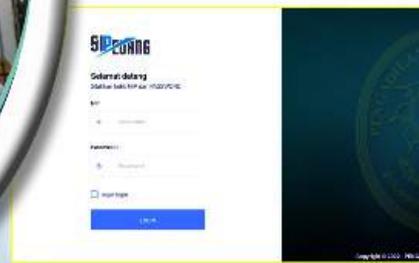




PENGADILAN TINGGI PADANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021



PIMPINAN



DR. H. AMRIL, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	195606201985031003
Golongan	:	Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan	:	S3 – Universitas Jayabaya
Tempat/ Tgl Lahir	:	Medan, 20 Juni 1956

ADE KOMARUDDIN, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	195804221986011003
Golongan	:	Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan	:	S2 – Universitas Tarumanagara
Tempat / Tgl Lahir	:	Bandung, 22 April 1958

HAKIM TINGGI



1. DR. H. AMRIL, S.H., M.H.
2. H. ADE KOMARUDDIN, S.H., M.H.
3. H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, S.H., M.H.
4. YULIUSMAN, S.H.
5. H. ASMUDDIN, S.H., M.H.
6. YULMAN, S.H., M.H.
7. PETRIYANTI, S.H., M.H.
8. INANG KASMAWATI, S.H.
9. H. ROHENDI, S.H., M.H.
10. SYAIFONI, S.H., M.HUM.
11. MASRIMAL, S.H.
12. INRAWALDI, S.H., M.H.
13. H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.
14. RETNO PURWANDARI L, S.H., MH.
15. ASMAR, S.H., M.H.
16. SUKMAYANTI, S.H., M.H.
17. CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.
18. RITA ELSY, S.H., M.H.

HAKIM ADHOC TIPIKOR

19. H. FIRDAUS, S.H., M.HUM.
20. LENDRAWATI, S.H., M.HUM.

PANITERA & SEKRETARIS



RINA PERTIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	196412031991032003
Golongan	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan	:	S2 – UPN Veteran Jakarta
Tempat / Tgl Lahir	:	Bandung, 03 Desember 1964



YEFNI DELFITRI, S.H., M.H.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang

NIP	:	196407031991032005
Golongan	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Pendidikan	:	S2 – Universitas Krisnadwipayana
Tempat / Tgl Lahir	:	Solok, 03 Juli 1964

KEPANITERAAN



1. PANMUD PERDATA
2. PANMUD PIDANA
3. PANMUD TIPIKOR
4. PANMUD HUKUM

INDRA SAKTI, S.H.

INDRA, S.H.

NILMAWATI, S.H.

NELDAWATI, S.H.

KESEKRETARIATAN



KABAG. UMUM DAN KEUANGAN

BUDIMAN, S.H., M.H.

1. KASUBAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

RENGGA SATHIA, S.KOM.

2. KASUBAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN

NOVITA SARI, S.KOM.

KABAG. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

1. KASUBAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

FITRIADI YURSAL, S.H.

2. KASUBAG. KEPEGAWAIAN DAN IT

AYU DAVMAYANTI, S.H.

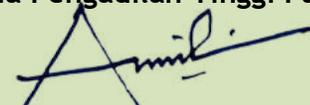
KATA PENGANTAR

Kami bersyukur telah menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2021, sebagai pertanggungjawaban terhadap hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Laporan ini dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/12/ 2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Laporan ini sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja. Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam tahun 2021. Dalam laporan ini telah tertuang kinerja utama dengan didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan sekaligus merupakan evaluasi bagi Pengadilan Tinggi Padang. Evaluasi dimaksud untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Semoga laporan ini dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Padang.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan kami sajikan dan kami juga berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Mahkamah Agung RI.

Padang, Januari 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Padang



DR. H. AMRIL, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Profil Pengadilan Tinggi Padang.....	1
B. Visi dan Misi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.....	4
BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI PADANG	7
A. Keadaan Perkara	8
1. Keadaan Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.....	8
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah Sisa Perkara Yang diputus.....	9
2. Jumlah Perkara Yang diputus Tepat Waktu	10
3. Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	11
4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi	14
C. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.....	16
1. Posbakum.....	16
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	17
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	18
A. Mutasi	21
B. Promosi	22
C. Pensiun.....	23
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARAN DAN TEKHNOLOGI INFORMASI	24
A. Pengelolaan Keuangan.....	24
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	28
1. Sarana Prasarana Gedung Kantor	28
2. Sarana Prasarana/ Prasarana Kantor	74
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	77
1. Implementasi E-Court	77
2. Implementasi SIPP	81

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	83
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	83
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	88
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	89
BAB VI PENGAWASAN.....	106
A. Internal.....	107
B. Evaluasi	123
BAB VII PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Rekomendasi.....	127



BAB I



PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. PROFIL PENGADILAN TINGGI PADANG



Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi berstatus A khusus. Terletak pada Ibukota Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang, Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi Padang merupakan kawal depan (*voorpst*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Padang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Padang mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding, juga mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Pengawasan rutin yang selalu dilakukan Pengadilan Tinggi Padang langsung ke daerah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

B.VISI & MISI PENGADILAN TINGGI PADANG

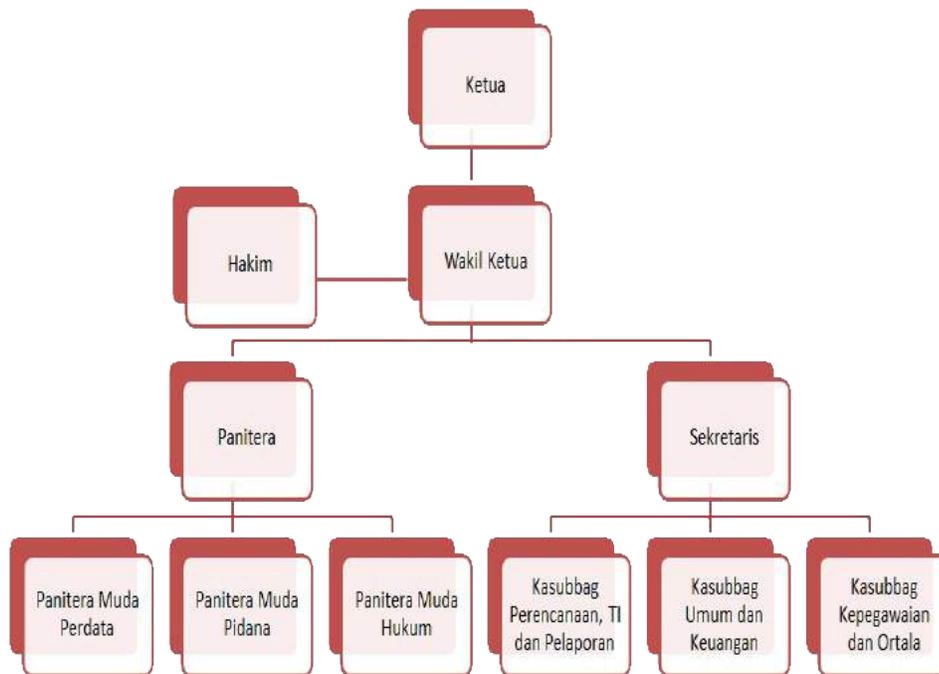
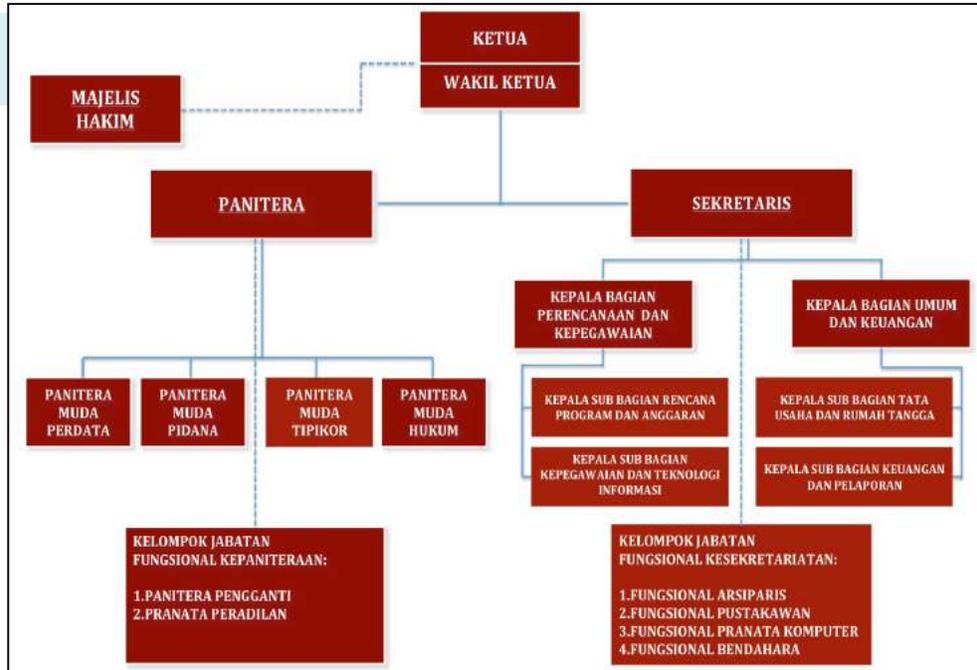


"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PADANG YANG AGUNG"



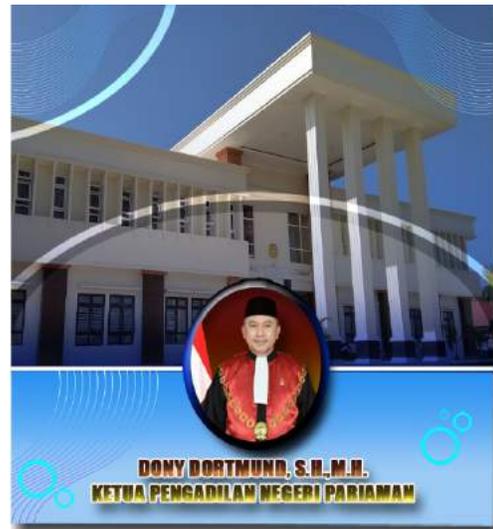
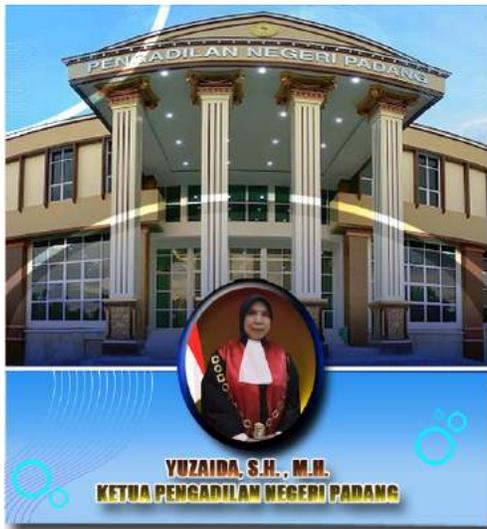
- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Padang;*
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;*
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang;*
- 4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang;*

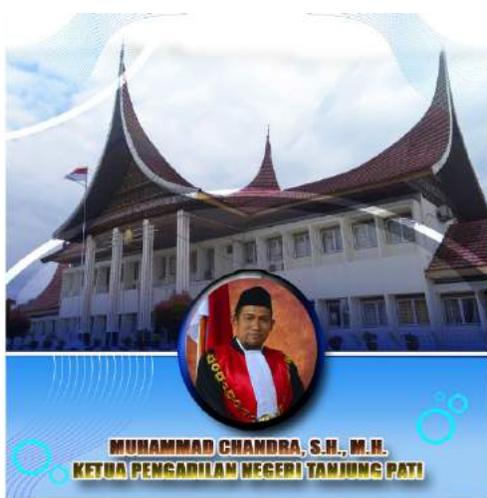
C. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

D. YURISDIKSI/WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG







BAB II

KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI PADANG



BAB II

KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI PADANG

Laporan ini merupakan hasil dari implementasi pengukuran kinerja selama tahun 2021. Memuat pertanggungjawaban atas keberhasilan dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan perencanaan, serta target yang telah diperjanjian dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Secara umum pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2021 adalah rata-rata telah mencapai target terutama pada indikator Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yaitu perkara yang diterima ataupun yang masuk pada Pengadilan Tinggi Padang dan seluruh Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat terdapat **143.504** perkara, sementara sisa pada awal tahun 2021 sejumlah **763** perkara. Kemudian perkara yang diterima dengan sisa tersebut menjadi beban kinerja selama tahun 2021 berjumlah **44.267** perkara. Namun diputus atau diselesaikan sejumlah **43.513** perkara, sehingga terdapat sisa pada akhir tahun adalah **670** perkara. Dapat disimpulkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, bahwa efektifitas pengelolaan perkara telah lebih baik dikarenakan mulai dari perkara masuk sampai bebannya telah berkurang, sehingga mempengaruhi jumlah putus dan sisa yang semakin berkurang pula. Dapat dilihat pada tabel keadaan perkara se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut:

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang dan se-Wilayah Hukumnya yaitu:

No	Pengadilan	Sisa 2020	Perkara Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa	Capaian Memutus
	Pengadilan Tinggi Padang	23	575	598	559	39	93%
1	Pengadilan Negeri Padang	270	18.590	18.860	18.610	250	99%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	84	447	531	438	9	82%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	37	2.967	3.004	2.949	55	98%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	6	436	442	438	4	99%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	47	1.221	1.268	1.241	27	98%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	6	1.084	1.090	1.078	12	99%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	29	1.983	2.012	1.991	21	99%
8	Pengadilan Negeri Solok	15	2.549	2.564	2.539	25	99%
9	Pengadilan Negeri Painan	49	3.288	3.337	3.280	57	98%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	5	775	780	771	9	99%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	29	1.907	1.936	1.903	33	98%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	35	1.942	1.977	1.970	7	99%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	60	282	342	304	38	89%
14	Pengadilan Negeri Muaro	5	1.691	1.696	1.680	16	99%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	48	1.795	1.843	1.807	36	98%

16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	15	1.972	1.987	1.955	32	98%
Total		763	143.504	44.267	43.513	670	

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020 Putus Tahun 2021

NO	PENGADILAN	SISA PERKARA TAHUN 2020	DIPUTUS TAHUN 2021	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang	23	23	100%
1	Pengadilan Negeri Padang	270	270	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	84	84	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	37	37	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	6	6	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	47	47	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	6	6	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	29	29	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	15	15	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	49	49	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	5	5	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	29	29	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	35	35	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	60	60	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	5	5	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	48	48	100%

16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	15	15	100%
Total		763	763	

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

NO	PENGADILAN	BEBAN	PUTUS TEPAT WAKTU	PUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PUTUS	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang	598	559	-	559	100%
1	Pengadilan Negeri Padang	18.860	18.535	75	18.610	98%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	531	421	17	438	79%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	3.004	2.945	4	2.949	98%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	442	438	-	438	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1.268	1.240	1	1.241	98%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1.090	1.072	6	1.078	98%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2.012	1.982	9	1.991	98%
8	Pengadilan Negeri Solok	2.564	2.539	-	2.539	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	3.337	3.274	6	3.280	98%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	780	770	1	771	99%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1.936	1.903	-	1.903	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1.977	1.965	5	1.970	99%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	342	304	-	304	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	1.696	1.680	-	1.680	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1.843	1.807	-	1.807	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1.987	1.954	1	1.955	99%
Total		44.267	43.388	125	43.513	

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Yang Tidak Mengajukan Banding

NO	PENGADILAN	PUTUS	BANDING	TIDAK BANDING	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang	-	-	-	-
1	Pengadilan Negeri Padang	18.610	156	1.8454	99%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	438	57	381	87%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	2.949	40	2.921	99%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	438	6	432	99%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1.241	60	1.180	95%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1.078	14	1.064	99%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	1.991	34	1.957	98%
8	Pengadilan Negeri Solok	2.539	21	2.518	99%
9	Pengadilan Negeri Painan	3.280	22	3.258	99%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	771	12	759	98%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1.903	22	1.881	99%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1.970	41	1.929	98%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	304	61	3.022	98%
14	Pengadilan Negeri Muaro	1.680	12	1.668	99%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1.807	30	1.777	98%
916	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1.955	18	1.937	99%
Total		42.954	606	45.138	

b. Yang Tidak Mengajukan Kasasi

NO	PENGADILAN	PUTUS	KASASI	TIDAK KASASI	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang	-	-	-	-
1	Pengadilan Negeri Padang	138	95	43	31%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	56	36	20	36%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	38	28	10	2
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	6	4	2	26%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	54	33	21	33%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	22	5	17	77%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	22	14	8	36%
8	Pengadilan Negeri Solok	18	15	3	17%
9	Pengadilan Negeri Painan	15	5	10	67%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	12	5	7	58%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	20	10	10	50%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	33	22	11	33%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	304	40	264	87%
14	Pengadilan Negeri Muaro	10	1	9	90%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	30	21	9	30%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	17	6	11	65%
Total		795	340	455	

c. Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

NO	PENGADILAN	PUTUS	PK	TIDAK PK	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang				
1	Pengadilan Negeri Padang	2.000	20	1.980	99%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	488	3	485	99%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	178	5	173	97%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	-	-
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1.301	-	1.301	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1.096	1	1.095	100%
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2.012	3	2.009	99%
8	Pengadilan Negeri Solok	2.487	1	2.486	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	3.288	-	3.288	100%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	783	-	783	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1.903	-	1.903	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	2.011	-	2.011	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	3.183	-	3.183	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	144	3	141	98%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	63	3	60	95%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	29	1	28	96%
Total		20.966	40	20.926	

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah perkara perdata tahun 2021 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang yang melakukan mediasi dan berhasil melalui mediasi dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

NO	PENGADILAN	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG MASUK	JUMLAH YANG BERHASIL DI MEDIASI	JUMLAH YANG TIDAK BERHASIL DI MEDIASI	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	268	10	258	4%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	112	1	111	99%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	64	-	64	0%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	8	3	5	37%
5	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	15	1	14	7%
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	53	4	49	7,5%
7	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	61	8	53	87%
8	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	14	-	14	0%
9	Pengadilan Negeri Batusangkar	35	1	34	3%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	8	4	4	50%
11	Pengadilan Negeri Solok	25	1	24	96%
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	37	-	37	0%
13	Pengadilan Negeri Muaro	23	9	14	39%
14	Pengadilan Negeri Painan	44	4	40	9%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	34	21	13	62%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	12	9	8	75%
	TOTAL	813	76	742	

1. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Jumlah perkara anak tahun 2021 pada Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang yang melakukan diversi dan berhasil melalui diversi dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

NO	PENGADILAN	JUMLAH PERKARA ANAK YANG MASUK	JUMLAH YANG BERHASIL DIVERSI	JUMLAH YANG TIDAK BERHASIL DIVERSI	CAPAIAN
1	Pengadilan Negeri Padang	53	-	53	0%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	13	-	13	0%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	7	1	6	14%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	6	3	3	50%
5	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	10	2	8	20%
6	Pengadilan Negeri Payakumbuh	5	-	5	0%
7	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	17	5	12	29%
8	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	-	1	0%
9	Pengadilan Negeri Batusangkar	4	1	3	25%
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	-	2	0%
11	Pengadilan Negeri Solok	3	2	1	33%
12	Pengadilan Negeri Koto Baru	7	5	2	71%
13	Pengadilan Negeri Muaro	11	3	8	27%
14	Pengadilan Negeri Painan	10	1	9	10%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	5	-	5	0%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-
TOTAL		154	23	131	-

C. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. POSBAKUM

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang	-	-	-	-
1	Pengadilan Negeri Padang	43.000.000	43.000.000	-	100%
2	Pengadilan Negeri Pariaman	24.000.000	24.000.000	-	100%
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	38.400.000	38.400.000	-	100%
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	24.000.000	24.000.000	-	100%
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	24.000.000	24.000.000	-	100%
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-	-	-
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	24.000.000	24.000.000	-	100%
8	Pengadilan Negeri Solok	19.200.000	19.200.000	-	100%
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-	-	-
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	19.200.000	19.200.000	-	100%
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	24.000.000	24.000.000	-	100%
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	24.000.000	24.000.000	-	100%
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	24.000.000	24.000.000	-	100%
14	Pengadilan Negeri Muaro	21.600.000	21.600.000	-	100%
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	24.000.000	24.000.000	-	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	24.000.000	24.000.000	-	100%
	Total	357.400.000	357.400.000	-	

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

NO	PENGADILAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	Pengadilan Tinggi Padang				
1	Pengadilan Negeri Padang	-	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Pariaman	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	-	-	-	-
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	-	-
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	-	-	-	-
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-	-	-
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	-	-	-	-
8	Pengadilan Negeri Solok	-	-	-	-
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-	-	-
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	-	-	-
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	-	-	-	-
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	-	-	-	-
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	89.500.000	89.040.000	460.000	
14	Pengadilan Negeri Muaro	-	-	-	-
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	158.000.000	158.000.000	-	100%
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-	-	-
Total		247.500.000	247.500.000	460.000	

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PENGADILAN	KETUA	WAKIL KETUA	HAKIM	PANITERA	SEKRETARIS	KEPANITERAAN				KESEKRETARIATAN			KET
							PANMUD	PP	JS	JSP	Kasub	Staf	PPNPN	
	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	18	1	1	4	21	-	-	4	14	20	
1	Pengadilan Negeri Padang	1	-	16	1	1	4	13	4	16	3	7	19	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	1	6	1	1	3	3	3	1	3	7	8	WKPN Kosong
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	9	1	1	3	6	5	-	3	7	11	WKPN & Sekretari s Kosong
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	4	1	1	3	2	1	1	3	2	8	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	7										
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping													
7	Pengadilan Negeri Batusangkar													
8	Pengadilan Negeri Solok													
9	Pengadilan Negeri Painan													
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang													

11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	1	7	1	1	3	4	2	1	3	4		
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	1	5	1	1	3	4	1	2	3	7	9	Panmud Pidana Kosong
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	6	1	1	2	4	2	-	3	4	10	Panmud Hukum Kosong
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	1	3	1	1	2	3	-	1	3	7	9	Panmud Hukum Kosong
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	1	6	1	1	2	1	1	-	3	3	9	Panmud Pidana Kosong
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	1	7	1	1	3	1	1	-	3	8	8	WKPN Kosong
Total		17	16	121	17	17	48	81	26					

A. MUTASI

NO	PENGADILAN	MASUK	KELUAR	KETERANGAN
	Pengadilan Tinggi Padang	13	4	
1	Pengadilan Negeri Padang	18	13	-
2	Pengadilan Negeri Pariaman	2	4	WKPN Kosong
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	11	5	WKPN pindah ke KPN Padang Panjang
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	2	3	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	2	2	-
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2	2	-
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	2	
8	Pengadilan Negeri Solok	2	3	
9	Pengadilan Negeri Painan	3	3	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	4	-
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	3	2	
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	2	1	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	2	
14	Pengadilan Negeri Muaro	6	4	Panmud Hukum Kosong
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	4	3	Panmud Pidana Kosong
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	3	2	WKPN Kosong
	Total	77	59	

B. PROMOSI

NO	PENGADILAN	MASUK	KELUAR	KETERANGAN
	Pengadilan Tinggi Padang	13	3	
1	Pengadilan Negeri Padang	3	4	
2	Pengadilan Negeri Pariaman	7	6	
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	7	3	
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	-	-	
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	2	2	
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2	2	
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	2	1	
8	Pengadilan Negeri Solok	4	1	
9	Pengadilan Negeri Painan	2	-	
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	3	
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	-	-	
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	2	2	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	2	2	
14	Pengadilan Negeri Muaro	8	4	
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	2	2	
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1	2	
	Total	59	37	

C. PENSIUN

NO	PENGADILAN	JABATAN	JUMLAH
	Pengadilan Tinggi Padang	PP= 8 Orang, Hakim Tinggi=1 Orang	9 Orang
1	Pengadilan Negeri Padang	PP= 5 Orang, Staf= 2 Orang, JSP= 2 Orang	9 Orang
2	Pengadilan Negeri Pariaman	PP = 1 Orang	1 Orang
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	Sekretaris = 1 Orang, Panmud Pidana= 1 Orang	2 Orang
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto		
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	Jurusita = 1 Orang, PP = 1 Orang	2 Orang
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	-	-
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	-	-
8	Pengadilan Negeri Solok	-	-
9	Pengadilan Negeri Painan	-	-
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	-	-
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	PP = 2 Orang	2 Orang
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Sekretaris = 1Orang, Kasubbag Ortala = 1 Orang, PP = 1 Orang, Staf = 1 Orang	4 Orang
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	-	-
14	Pengadilan Negeri Muaro	-	-
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	-	-
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	-	-
Total			29 Orang

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

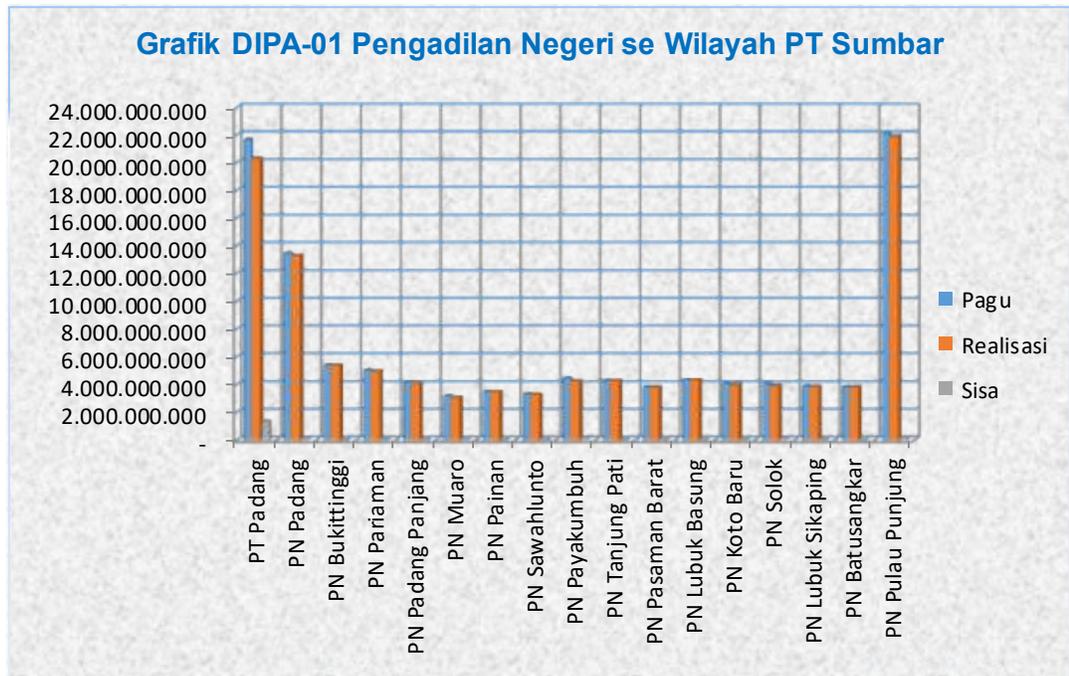
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat 3 (tiga) program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01 BUA)
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01 BUA)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03 BADILUM)

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel - tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran DIPA 01 T.A 2021

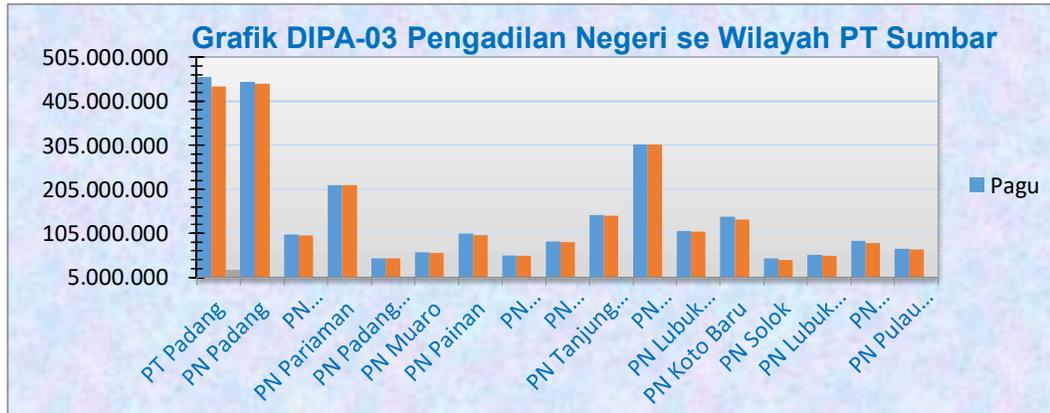
NO	SATKER	PAGU 2021	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	PT PADANG	Rp. 21.680.448.000	Rp. 20.315.106.920	Rp. 1.365.341.080	93,70%
2	PN PADANG	Rp. 13.496.006.000	Rp. 13.327.210.951	Rp. 168.795.049	98,74%
3	PN BUKITTINGGI	Rp. 5.446.813.000	Rp. 5.423.901.284	Rp. 22.911.716	99,54%
4	PN PARIAMAN	Rp. 5.071.124.000	Rp. 4.992.788.280	Rp. 78.335.720	98,46%
5	PN PADANG PANJANG	Rp. 4.225.925.000	Rp. 4.148.842.324	Rp. 77.082.676	98,18%
6	PN MUARO	Rp. 3.214.175.000	Rp. 3.114.204.130	Rp. 99.970.870	96,89%
7	PN PAINAN	Rp. 3.530.044.000	Rp. 3.512.132.210	Rp. 17.911.790	99,49%
8	PN SAWAHLUNTO	Rp. 3.349.764.000	Rp. 3.302.400.361	Rp. 47.363.639	98,59%
9	PN PAYAKUMBUH	Rp. 4.487.461.000	Rp. 4.271.924.237	Rp. 215.536.763	97,86%
10	PN TANJUNG PATI	Rp. 4.322.468.000	Rp. 4.293.907.392	Rp. 28.560.608	99,34%
11	PN PASAMAN BARAT	Rp. 3.856.218.000	Rp. 3.840.074.084	Rp. 16.143.916	99,58%
12	PN LUBUK BASUNG	Rp. 4.375.530.000	Rp. 4.370.317.265	Rp. 5.212.735	99,88%
13	PN KOTO BARU	Rp. 4.117.494.000	Rp. 4.042.972.868	Rp. 74.521.132	98,19%
14	PN SOLOK	Rp. 4.141.408.000	Rp. 3.965.573.596	Rp. 175.834.404	95,75%
15	PN LUBUK SIKAPING	Rp. 3.924.174.000	Rp. 3.886.743.715	Rp. 37.430.285	99,05%
16	PN BATUSANGKAR	Rp. 3.864.451.000	Rp. 3.861.486.711	Rp. 2.964.289	99,92%
17	PN PULAU PUNJUNG	Rp. 22.139.722.000	Rp. 21.928.860.207	Rp. 210.861.793	99,05%



Tabel 2. Realisasi Anggaran DIPA 03 T.A 2021

NO	SATKER	PAGU 2021	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	PT PADANG	Rp. 459.635.000	Rp. 437.547.995	Rp. 22.087.005	95,19%
2	PN PADANG	Rp. 449.365.000	Rp. 444.556.550	Rp. 4.808.450	98,93%
3	PN BUKITTINGGI	Rp. 101.740.000	Rp. 100.094.000	Rp. 79.500	98,38%
4	PN PARIAMAN	Rp. 214.020.000	Rp. 213.930.673	Rp. 89.327	99,96%
5	PN PADANG PANJANG	Rp. 47.716.000	Rp. 47.635.930	Rp. 80.070	99,83%
6	PN MUARO	Rp. 61.907.000	Rp. 60.604.500	Rp. 1.302.500	97,90%
7	PN PAINAN	Rp. 104.928.000	Rp. 101.185.000	Rp. 3.743.000	96,43%
8	PN SAWAHLUNTO	Rp. 55.030.000	Rp. 54.172.015	Rp. 857.985	98,44%
9	PN PAYAKUMBUH	Rp. 86.700.000	Rp. 85.592.000	Rp. 1.108.000	99,86%
10	PN TANJUNG PATI	Rp. 146.815.000	Rp. 145.760.800	Rp. 1.054.200	99,28%
11	PN PASAMAN BARAT	Rp. 306.418.000	Rp. 306.338.500	Rp. 79.500	99,97%
12	PN LUBUK BASUNG	Rp. 109.649.000	Rp. 109.346.900	Rp. 302.100	99,72%
13	PN KOTO BARU	Rp. 142.930.000	Rp. 136.489.400	Rp. 6.440.600	95,49%
14	PN SOLOK	Rp. 48.525.000	Rp. 44.693.0000	Rp. 3.832.000	92,10%
15	PN LUBUK SIKAPING	Rp. 55.549.000	Rp. 53.210.000	Rp. 2.339.000	95,79%

16	PN BATUSANGKAR	Rp. 87.340.000	Rp. 83.553.600	Rp. 3.786.400	95,66%
17	PN PULAU PUNJUNG	Rp. 69.243.000	Rp. 68.530.600	Rp. 712.400	98,98%



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana/Prasarana Gedung Kantor

Tabel Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor

Wilayah Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat

NO.	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	*KETERANGAN
I.	PENGADILAN TINGGI PADANG		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang umum	6	
8	Ruang Sidang Anak	1	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12	Ruang Kepaniteraan PHI	1	
13	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	2	
15	Ruang Jurusita	1	
16	Ruang Kepegawaian, Ortala gabung dengan Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
17	Ruang Umum dan Keuangan	1	
18	Ruang Server	1	
19	Ruang Panmud Pidana	1	
20	Ruang Panmud Perdata	1	

21	Ruang Panmud Hukum	1	
22	Ruang Panmud PHI	1	
23	Ruang Panmud Tipikor	1	
24	Ruang Kasub Umum	1	
25	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	1	
26	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
27	Ruang Bendahara	1	
28	RuangMediasi	1	
29	Ruang Kaukus	1	
30	Ruang Perpusakaan	1	
31	Ruang Arsip	3	
32	Ruang Jaksa	1	
33	Ruang Polisi	1	
34	Ruang Posbakum	1	
35	Ruang Advokat/ Pengacara	1	
36	Ruang Tahanan	5	
37	Ruang Penjaga Tahanan	2	
38	Ruang Barang Bukti	1	
39	Ruang Laktasi	1	
40	Ruang Teleconference	1	
41	Ruang Control Audio	1	
42	Ruang ATK	1	
43	Ruang M.E	2	
44	Toilet	28	
45	Toilet Difable	2	
46	Mushola	1	
47	Tempat Wudhuk	1	
48	Ruang Penyimpanan	4	
49	Aula	1	

50	Ruang Tunggu PTSP	1	
51	Ruang Tunggu Terbuka	2	
52	Ruang Tunggu Anak	1	
53	Ruang PTSP	1	
54	Ruang Kasir	1	
55	Ruang Rapat	2	
56	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1	
57	Ruang Makan Hakim	1	
58	Ruang Istirahat Ketua	1	
59	Ruang Istirahat Wakil Ketua	1	
60	Ruang Istirahat Security	1	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Mesin Fotocopy Electronic	1	
2	Lemari Besi/Metal	9	
3	Lemari Kayu	44	
4	Rak Besi	3	
5	Filing Kabinet Besi	3	
6	Brandkas	1	
7	Mobile File	10	
8	Tabung Pemadam Api	10	
9	CCTV-Camera Control Television System	1	
10	Papan Visual/Papan Nama	7	
11	Mesin Absensi	2	
12	Overhead Projector	1	
13	Display	1	
14	Pintu Elektrik	1	

15	Meja Kerja Kayu	65	
16	Kursi Besi/Metal	206	
17	Kursi Kayu	1	
18	Sice	15	
19	Meja Rapat	11	
20	Tempat Tidur Kayu	8	
21	Meja Resepsionis	2	
22	Meja Makan Kayu	10	
23	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	
24	Nakas	8	
25	Meubelair Lainnya	1	
26	Jam Elektronik	2	
27	Mesin Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	1	
28	Mesin Pemotong Rumput	1	
29	Mesin Cuci	8	
30	Lemari Es	10	
31	A.C. Split	49	
32	Kipas Angin	5	
33	Alat Pendingin Lainnya	2	
34	Kitchen Set	2	
35	Televisi	13	
36	Loudspeaker	4	
37	Sound System	1	
38	Microphone Table Stand	20	
39	Unit Power Supply	2	
40	Stabilisator	13	
41	Camera Video	1	
42	Dispenser	15	
43	Lambang Instansi	1	

44	Vertical Blind	1	
45	Gordyin/Kray	8	
46	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	
47	Compact Disc Player	1	
48	Camera Digital	1	
49	Telephone (PABX)	23	
50	Facsimile	1	
51	Genset	1	
52	Local Area Network (LAN)	1	
53	Internet	3	
54	P.C. Unit	34	
55	Laptop	24	
56	Printer	32	
57	Scanner	2	
58	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	
59	Jaringan dengan Media Udara Lainnya	1	
II.	PENGADILAN NEGERI PADANG		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang umum	6	
8	Ruang Sidang Anak	1	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	

12	Ruang Kepaniteraan PHI	1	
13	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	2	
15	Ruang Jurusita	1	
16	Ruang Kepegawaian, Ortala gabung dengan Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
17	Ruang Umum dan Keuangan	1	
18	Ruang Server	1	
19	Ruang Panmud Pidana	1	
20	Ruang Panmud Perdata	1	
21	Ruang Panmud Hukum	1	
22	Ruang Panmud PHI	1	
23	Ruang Panmud Tipikor	1	
24	Ruang Kasub Umum	1	
25	Ruang Kasub Kepegawaian, Ortala	1	
26	Ruang Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
27	Ruang Bendahara	1	
28	Ruang Mediasi	1	
29	Ruang Kaukus	1	
30	Ruang Perpusakaan	1	
31	Ruang Arsip	3	
32	Ruang Jaksa	1	
33	Ruang Polisi	1	
34	Ruang Posbakum	1	
35	Ruang Advokat/ Pengacara	1	
36	Ruang Tahanan	5	
37	Ruang Penjaga Tahanan	2	
38	Ruang Barang Bukti	1	
39	Ruang Laktasi	1	

40	Ruang Teleconference	1	
41	Ruang Control Audio	1	
42	Ruang ATK	1	
43	Ruang M.E	2	
44	Toilet	28	
45	Toilet Difable	2	
46	Mushola	1	
47	Tempat Wudhuk	1	
48	Ruang Penyimpanan	4	
49	Aula	1	
50	Ruang Tunggu PTSP	1	
51	Ruang Tunggu Terbuka	2	
52	Ruang Tunggu Anak	1	
53	Ruang PTSP	1	
54	Ruang Kasir	1	
55	Ruang Rapat	2	
56	Ruang Tamu Ketua dan Ajudan	1	
57	Ruang Makan Hakim	1	
58	Ruang Istirahat Ketua	1	
59	Ruang Istirahat Wakil Ketua	1	
60	Ruang Istirahat Security	1	
	Sarana dan Pra Sarana Fasilitas Perkantoran		
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13Inci)	2	Buah
2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27Inci)	5	Buah
3	Mesin Fotocopy Electronic	2	Buah
4	Lemari Besi	6	Buah
5	Lemari Kayu	77	Buah

6	Rak kayu	39	Buah
7	Filling Cabinet Besi	15	Buah
8	Filling Cabinet Kayu	4	Buah
9	Brankas	5	Buah
10	Mobile File	5	Buah
11	CCTV	2	Buah
12	Papan Visual/Papan Nama	9	Buah
13	WhiteBoard	19	Buah
14	Mesin Absensi	3	Buah
15	LCD Projector/Infocus	1	Buah
16	Perkakas Kantor Lainnya	8	Buah
17	Meja Kerja Kayu	143	Buah
18	Kursi Besi/Metal	329	Buah
19	Kursi Kayu	59	Buah
20	Sice	11	Buah
21	Bangku Panjang Besi/Metal	8	Buah
22	Bangku Panjang Kayu	53	Buah
23	Meja Rapat	33	Buah
24	Meja Komputer	13	Buah
25	Meja Telepon	1	Buah
26	Meja Resepsionis	2	Buah
27	Kasur/Spring Bed	1	Buah
28	Kursi FiberGlas/Plastik	13	Buah
29	Partisi	2	Buah
30	Nakas	3	Buah
31	Jam Elektronik	17	Buah
32	AC Window	2	Buah
33	AC Split	38	Buah
34	Kipas Angin	27	Buah

35	Televisi	7	Buah
36	TapeRecorder (Alat Rumah tanggainnya)	1	Buah
37	Sound System	3	Buah
38	Wireless	1	Buah
39	MicConference	1	Buah
40	LambangGarudaPancasila	4	Buah
41	GambarPresiden/Wakil Presiden	2	Buah
42	TiangBendera	17	Buah
43	KacaHias	5	Buah
44	Mimbar/Podium	2	Buah
45	Palu Sidang	4	Buah
46	Lambang Instansi	1	Buah
47	Kabel Roll	1	Buah
48	Audio Visual	1	Buah
49	UPS	10	Buah
50	Pesawat telepon	22	Buah
51	Facsimilie	3	Buah
52	FingerPrinterTime andAttandanceAcces ControlSystem		4
53	SwitcherCombination	7	Buah
54	Modem Internet	3	Buah
55	PC Unit	78	Buah
56	Laptop	27	Buah
57	Monitor	3	Buah
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52	Buah
59	Scanner(Peralatan Personal Komputer)	4	Buah
60	Server	3	Buah
61	Router	3	Buah
62	Hub	9	Buah
63	Kabel UTP	3	Buah

64	HT (Handy Talkie)	10	Unit
65	MejaKerjaKubikal 2	2	Unit
66	MejaKerjaKubikal 4	16	Unit
67	MejaKerjaBendaharadanMejaKerja Hakim	26	Unit
68	MejaKerjaSekretarisdanMejaKerjaPanitera	2	Unit
69	MejaKerjaPanmuddanMejaKerjaKasubag	8	Unit
70	Sofa RuangKerja	2	Set
71	Kursi Staff danKursiKerjaBendahara	69	Unit
72	Kursi Staff PTSP	7	Unit
73	KursiKerjaPanmud, KursiKerjaKasubag, KursiKerja Hakim	33	Unit
74	KursiSekretaris, KursiPanitera, KursiPimpinanRapat	6	Unit
75	KursiRapat	16	Unit
76	KursiHadapSekretarisdanKursiHadapPanitera	4	Unit
77	KursiHadapPanmud, KursiHadapKasubag, KursiHadapBendahara, KursiHadap PTSP	24	Unit
78	KursiKerjaKetua, KursiKerjaWakilKetua	2	Unit
79	KursiRapatKetua, KursiRapatWakilKetua	14	Unit
80	KursiHadapKetua, KursiHadapWakilKetua	4	Unit
81	KursiTerdakwa	6	Unit
82	MejaKerjaKetua, MejaKerjaWakilKetua	4	Unit
83	MejaSidangUtama	1	Unit
84	MejaSidangJaksaPenuntutdanMejaPenasehatHukum	2	Unit
85	MejaPanitera	1	Unit
86	KursiSidang Hakim Ketua	1	Unit
87	KursiSidang Hakim Anggota	4	Unit
88	KursiSidangJaksaPenuntut, KursiPenasehatHukum, danKursiPaniteraPengganti	9	Unit
III.	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN		

1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	3	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Mediasi	1	
9	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12	Ruang Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	1	
13	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
14	Ruang Umum dan Keuangan	1	
15	Ruang Server	1	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Perpustakaan	1	
18	Ruang Arsip	1	
19	Ruang Jaksa	1	
20.	Ruang Polisi	1	
21.	Ruang Pengacara	1	
22.	Ruang Tahanan	2	
23.	Ruang Barang Bukti	-	
24.	Ruang Laktasi	1	
25.	Toilet Ketua	1	
26.	Toilet Wakil Ketua	1	
27.	Toilet Hakim	2	
28.	Toilet Panitera	1	
29.	Toilet Sekretaris	1	

30.	Toilet Pegawai	2	
31.	Toilet Umum	2	
32.	Toilet Tahanan	2	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Videoscope With Side Band Adaptor	1	
2	Scanner (Universal Tester)	2	
3	Neraca Percisi (Elektronik Vacuum Me)	1	
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	
5	Mesin Fotocopy Electronic	1	
6	Lemari Kayu	35	
7	Filling Cabinet Besi	8	
8	Barndkas	3	
9	Tabung Pemadam Api	7	
10	CCTV	10	
11	Papan Nama/Papan Visual	23	
12	White Board	9	
13	Mesin Absensi	2	
14	Perkakas Kantor Lainnya	35	
15	Meja Kerja Kayu	99	
16	Kursi Besi/Metal	309	
17	Kursi Kayu	33	
18	Sice	9	
19	Bangku Panjang Besi/Metal	4	
20	Bangku Panjang Kayu	43	
21	Meja Komputer	5	
22	Meja Resepsionis	2	
23	Partisi	2	

24	Jam Elektronik	8	
25	Mesin Pemetong Rumput	1	
26	AC Window	8	
27	AC Split	17	
28	Kipas Angin	5	
29	Televisi	4	
30	Amplifier	1	
31	Loudspeaker	1	
32	Sound System	4	
33	Megaphone	1	
34	Microphone	1	
35.	Microphone Table Stand	1	
36.	Mic Conference	5	
37.	Lambang Garuda Pancasila	4	
38.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
39.	Tiang Bendera	6	
40.	Kaca Hias	4	
41.	Palu Sidang	4	
42.	Lambang Instansi	2	
43.	Vertical Blind	225	
44.	Intercom Unit	3	
45.	Uninterruptible Power Suply (UPS)	6	
46.	LCD Monitor	1	
47.	Pesawat Telephone	1	
48.	Facsimile	1	
49.	Genset	1	
50.	Internet	1	
51.	Komputer Jaringan Lainnya	1	
52.	P.C. Unit	30	

53.	Lap Top	16	
54.	Note Book	2	
55.	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	
56.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	
57.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	
58.	Server	1	
59.	Router	1	
60.	Alat Tennis Meja	1	
61.	Monografi	13	
62.	Kios K	1	
IV.	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Wakil Panitera	1	
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
9	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
10	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
11	Ruang Panitera Pengganti	1	
12	Ruang Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
13	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
14	Ruang Umum dan Keuangan	2	
15	Ruang Server	1	
16	Ruang Mediasi	1	
17	Ruang Perpusakaan	1	

18	Ruang Arsip	1	
19	Ruang Jaksa	1	
20	Ruang Polisi	1	
21	Ruang Posbakum	1	
22	Ruang Tahanan	2	
23	Ruang Barang Bukti	1	
24	Ruang Laktasi	1	
25	Toilet Ketua	1	
26	Toilet Wakil Ketua	1	
27	Toilet Hakim	1	
28	Toilet Pegawai	2	
29	Toilet Umum	2	
30	Toilet Difable	1	
31	Kantin	1	
32	Mushola	1	
33	Lapangan Tenis	1	
34	Ruang Penyimpanan	3	
35	Pos Jaga Satpam	2	
36	Ruang Tunggu Anak	1	
	Sarana/ Pra Sarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	33	
2	Laptop	10	
3	LCD/ Infokus	5	
4	PABX	2	
5	Mesin Ketik	16	
6	Mesin Fotocopy	1	
7	AC Split	5	
8	Faximile	1	
9	Genset	1	

10	Printer	36	
11	Server	2	
12	CCTV	5	
13	Televisi	5	
14	Mesin potong Rumput	3	
15	Mesin Pengisap Debu Vacum Cleaner	2	
16	Kompor Gas	1	
17	Scanner	4	
18	Keyboard	1	
19	Router	1	
20	Waterjet Injector	1	
21	Monograpi	1545	
22	Stabilator	5	
23	Lambang Garuda Pancasila	5	
24	Tiang Bendera	10	
25	Kaca Hias	4	
26	dispenser	6	
28	Palu Sidang	3	
29	Lambang Instansi	2	
30	Handycam	1	
31	Karpet	112	
32	Gorden/ Krei	13	
33	Keset Kaki	2	
34	UPS	7	
35	Analog/ Digital reseiver	1	
36	Intermediate Telepon/ Key Telepon	1	
37	Pesawat Telepon	1	
38	Unit TransceiverVHT Station Nery	1	
39	Local Area Network	1	

40	Kipas Angin	1	
41	Mesin Absensi	2	
42	Alat Penggaman Sinyal	1	
43	Jam Mekanis	9	
44	Jam Elektronik	13	
45	Tape Recorder	2	
46	Loudspeaker	8	
47	Sound Sistem	1	
48	Mikropon	4	
49	Lemari Besi Metal	2	
50	Lemari Kayu	45	
51	Filling Kabinet	6	
52	Rak Besi	5	
53	Ac Windows	5	
54	Rak Kayu	2	
55	Brankas	4	
57	Tabung Pemadam Api	2	
58	Papan Visual (Papan Nama)	35	
59	Whiteboard	8	
60	Perkakas kantor lainnya	7	
61	Meja Kerja Kayu	140	
62	Kursi Besi Metal	151	
63	Kursi kayu	226	
64	Sice	14	
65	Bangku Panjang Kayu	6	
66	Meja Komputer	5	
67	Kursi Fiberglass/ Plastik	1	
68	Nakas	2	
69	Meubelair lainnya	3	

V.	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Wapan	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Sidang Umum	3	
8	Ruang Kepaniteraan	3	
9	Ruang Kesekretariatan	3	
10	Ruang Rapat	1	
11	Ruang Mediasi	1	
12	Ruang Laktasi	1	
13	Ruang Posyankum	1	
14	Ruang Jaksa	1	
15	Ruang Ramah Anak	1	
16	Ruang Barang Bukti	1	
17	Ruang Serbaguna	1	
18	Ruang Tahanan	2	
19	Mushalla dan Ruang Ginset	1	
20	Dapur Bersih	1	
21	Toilet Umum	4	
22	Gudang	1	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer/PC	16 Unit	
2	Laptop	8 Unit	
3	Karpet Lantai	14 Meter	
4	PABX	1 Paket	

5	Mesin Ketik	24	Rusak Berat
6	Mesin Fotocopy	1 Unit	Rusak Berat
7	AC	29 Unit	1 AC Standing
8	Faximile	1 Unit	
9	Genset	1 Unit	
10	TV LCD	3 Unit	
11	Printer	15 Unit	
12	Scanner	2 Unit	
13	UPS	7 Unit	
14	Jaringan/Internet/Wifi	1 Paket	
15	Router (Wireless)	8 Unit	
16	Hub ((Switch)	3 Unit	
17	Modem ADSL	1 Unit	
18	ISP Telkom Astinet	1 Unit	
19	CCTV	1 Paket	
20	Speaker Ruangan	1 Paket	
21	Screen Proyektor	1 Unit	
22	Meja Rak Server	1 Unit	
23	Anti Virus	1 Unit	
24	Gorden	1 Paket	
VI.	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	3	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	3	Baik
7.	Ruang Panmud Pidana	1	Baik

8.	Ruang Panmud Perdata	1	Baik
9.	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
11.	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Baik
12.	Ruang Kasubag Perencanaan ,IT dan Pelaporan	1	Baik
13.	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
14.	Ruang Klinik Kesehatan	1	Baik
15.	Ruang Pos Pelayanan Hukum	1	Baik
16.	Ruang Gasrase/ Dapur	1	Baik
17.	Ruang Arsip	1	Baik
18.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
19.	Ruang Tunggu Anak	1	Baik
20.	Ruang Ramah Anak / Laktasi	1	Baik
21.	Ruang Jaksa	1	Baik
22.	Ruang Tahanan	2	Baik
23.	Ruang Mediasi / Diversi	1	Baik
24.	Ruang Media center	1	Baik
25.	Ruang Ziiting platz	2	Di Suliki dan di Pangkalan
26.	Ruang Toilet	7	Baik
27.	Ruang Mushola	1	Baik
28.	Ruang Genset	1	Baik
29.	Ruang Penyimpanan	1	Baik
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1.	Mesin Ketik Manual portable (11-13 Inc)	4	Baik 2,Rusak Ringan1dan Rusak Berat 1
2.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inc)	1	Rusak berat
3.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27Inc)	12	Baik 5 dan Rusak Berat 7
4.	Mesin Ketik listri portable (11-13 Inc)	1	Baik
5.	Mesin Hitung Listri	1	Baik

6	Mesin Hitung Elektrik/kalkulator	4	Baik 3 dan Rusak Ringan 1
7.	Mesin Foto copy folio	1	Baik
8.	Lemari Besi/ metal	3	Baik 2 dan Rusak Ringan 1
9.	Lemari kayu	50	Baik 32 dan Rusak Ringan 18
11.	Rak kayu	4	Baik
12	Filing Cabinet besi	13	Baik 6 Rusak Ringan 6 dan Rusak Berat 1
13.	Brankas	2	Baik 1 dan Rusak Ringan 1
14.	Peti uang /cashbox/Coin Box	3	Baik 2 dan Rusak Ringan 1
15.	Kardek Besi	2	Baik 1 dan Rusak Ringan 1
16.	Buffet	1	Baik
17.	Locker	4	Baik
18.	Tabung pemadam api	4	Rusak Berat
19.	CCTV	3	Baik
20.	Papan fisual/ papan nama	2	Baik
21.	White board	48	Baik 8, Rusak Ringan 27 dan Rusak Berat 13
22.	Peta	1	Baik
23	Mesin absen	3	Baik 2 dan Rusak Ringan 1
24.	Hard Metal detector	1	Baik
25.	Meja kayu	136	Baik 39, Rusak Ringan 68 dan Rusak Berat 9
26.	Kursi besi/metal	235	Baik 180, Rusak Ringan 21 dan Rusak Berat 24
27.	Kursi kayu	201	Baik 140, Rusak Ringan 47 dan Rusak Berat 14
28.	Sice	32	Baik 24, Rusak Ringan 6 dan Rusak Berat 2
29.	Bangku Panjang besi/metal	14	Baik 14 dan Rusak Berat 2
30.	Bangku panjang kayu	25	Baik 3, Rusak Ringan 15 dan Rusak Berat 7
31.	Meja rapat	10	Baik 8 dan Rusak Ringan 2

32.	Meja komputer	21	Baik 20 dan Rusak Ringan 1
33.	Meja ketik	2	Rusak ringan
34.	Meja telpon	2	Baik 1 dan Rusak Ringan 1
35.	Meja Resepsionis	3	Baik 2 dan Rusak Berat 1
36.	Partisi	4	Baik
37.	Meubelair lainnya	1	Baik
38.	Meubelair lainnya	2	Baik
39	Jam elektronik	39	Baik 17,Rusak Ringan 13 dan Rusak Berat 9
40.	Mesin penghisap debu	3	Baik
41.	Mesin potong rumput	3	Baik 2 dan Rusak Ringan 1
42	Lemari es	2	Baik
43.	Ac Spilit	20	Baik 19 dan Rusak Berat 1
44.	Kipas angin	18	Baik 16 dan Rusak Berat 2
45.	Kompr gas	1	Baik
46.	Kompor minyak	2	Baik
47.	Rice cooker	3	Baik
48.	Oven listrik	1	Baik
49.	Blender	1	Baik
50.	Alat dapur lainnya	180	Baik
51.	Televisi	5	Baik
52.	Tape recorder	1	Rusak ringan
53.	Loud speaker	2	Baik
54	Sound Sistem	2	Baik
55.	Stabilisator	1	Rusak ringan
56.	Lambang Garuda Pancasila	4	Rusak Ringan 3 dan Rusak Berat 1
57	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	Baik 1 dan Rusak Ringan 1
58	Tiang bendera	13	Baik 5 dan Rusak Ringan 8
59	Pataka	5	Baik

60	Kaca hias	18	Baik 6, Rusak Ringan 3 dan Rusak Berat 9
61.	Dispenser	4	Baik
62.	Palu sidang	6	Baik 2 Dan Rusak Ringan 4
63.	Lambang instansi	1	Baik
64.	Kapet	14	Baik
65.	Vertikal Blind	1	Baik
66.	Alat Rumah Tangga lainnya	33	Baik
67.	Mixer Pvc	1	Baik
68.	Camera digital	1	Baik
69.	Telepone (PABX)	1	Baik
70	Pesawat telepon	26	22 Baik dan Rusak Berat 2
71.	Facsimile	1	Baik
72.	Antenna stationary	1	Baik
73.	Receiver sti/uni	4	Baik
74	Local area network (lan)	2	Baik 1 dan Rusak Berat 1
75.	P.c unit	36	Baik 29 dan Rusak Berat 7
76.	Laptop	9	Baik 7 dan rusak Berat 2
77.	CPu (peralatan miframe)	2	Baik
78.	Serial printer	6	Baik 4 dan Rusak Berat 2
79.	CPU (peralatan personal computer)	2	Baik
80.	Monitor	2	Baik
81	Printer (peralatan personal computer)	42	Baik 23 dan Rusak Berat 19
82.	Peralatan rumah tangga lainnya	39	Baik
83.	Server	2	Baik
84	Router	1	Baik
85	Switch	4	Baik
86	Monografi	1911	Baik 1862 dan Rusak Ringan 49
87	Buku lainnya	6	Baik

88	Sofware komputer	1	Baik
VII.	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	2	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	3	Baik
7.	Ruang Panmud Pidana	1	Baik
8.	Ruang Panmud Perdata	1	Baik
9.	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
11.	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Baik
12	Ruang Kasubag Perencnaan ,IT dan Pelaporan	1	Baik
13.	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
14.	Ruang Pos Pelayanan Hukum	1	Baik
15.	Ruang Arsip	1	Baik
16.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
17.	Ruang Tunggu Anak	1	Baik
18.	Ruang Menyusui	1	Baik
19.	Ruang Jaksa	1	Baik
20.	Ruang Tahanan	2	Baik
21.	Ruang Mediasi / Diversi	1	Baik
22.	Toilet	8	Baik
23.	Mushola	1	Baik
24.	Ruang Penyimpanan (Gudang)	2	Baik
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Transportable Generating Set	1	Baik

2.	Portable Water Pump	1	Baik
3.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	6	Baik 4 dan Rusak Ringan 1, Rusak Berat 1
4.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	6	Baik 2, Rusak Ringan 1 dan Rusak Berat 2
5.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	24	Baik 6, Rusak Ringan 2 dan Rusak Berat 16
6.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	4	Baik 3 dan Rusak Ringan 1
7.	Mesin Hitung Manual	2	Rusak Berat 2
8.	Mesin Hitung Listrik	1	Rusak Berat 1
9.	Mesin Hitung Elektronik/calculator	3	Rusak Berat 3
11.	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
12.	Lemari Kayu	50	Baik 35 Rusak Ringan 13 dan Rusak Berat 2
13.	Rak Besi	8	Baik
14.	Rak Kayu	7	Rusak Ringan 6 dan Rusak Berat 1
15.	Filing Cabinet Besi	5	Baik 1 dan Rusak Ringan 3, Rusak Berat 1
16.	Filing Cabinet Kayu	5	Baik 4 dan Rusak Berat 1
17.	Brandkas	3	Baik
18.	Kardex Kayu	1	Baik
19.	Cctv - Camera Control Television System	1	Baik
20.	Papan Visual/papan Nama	1	Baik
21.	White board	22	Baik 19, Rusak Ringan 0 dan Rusak Berat 3
22.	Mesin Absensi	3	Baik
23.	Hand Metal Detector	3	Baik
24.	Alat Pengaman / Sinyal	2	Baik
25.	Lcd Projector/infocus	1	Baik
26.	Perkakas Kantor Lainnya	5	Baik
27.	Meja Kerja Kayu	94	Baik 56, Rusak Ringan 38
28.	Kursi Besi/metal	204	Baik 110, Rusak Ringan 80 dan

			Rusak Berat 14
29.	Kursi Kayu	43	Baik22, Rusak Ringan 17 dan Rusak Berat 4
30.	Sice	17	Baik7, Rusak Ringan2 dan Rusak Berat8
31.	Bangku Panjang Kayu	35	Baik 24dan Rusak Ringan 10, Rusak Berat 1
32.	Meja Resepsionis	3	Baik2 dan Rusak Berat 1
33.	Kursi Fiber Glas/plastik	2	Baik
34.	Jam Elektronik	13	Baik
35.	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
36.	Lemari Es	1	Baik
37.	A.c. Split	19	Baik
38.	Kipas Angin	12	Baik 10 Rusak Ringan 2
39	Televisi	3	Baik
40.	Amplifier	2	Baik1, Rusak Berat 1
41.	Loudspeaker	7	Baik 4dan Rusak Berat 3
42	Sound System	4	Baik 3 dan Rusak Berat 1
43.	Megaphone	1	Rusak Berat
44.	Microphone	3	Rusak Berat
45.	Microphone Table Stand	5	Baik
46.	Stabilisator	1	Baik
47.	Tustel	1	Rusak Berat
48.	Alat Hiasan	1	Baik
49.	Lambang Garuda Pancasila	8	Baik
50.	Gambar Presiden/wakil Presiden	6	Baik 6 dan Rusak Berat 6
51.	Tiang Bendera	7	Baik
52.	Kaca Hias	7	Baik
53.	Dispenser	2	Baik
54	Palu Sidang	2	Baik

55.	Lambang Instansi	2	Baik
56.	Karpet	4	Baik 2 dan Rusak Berat 2
57	Vertikal Blind	1	Baik
58	Gordyin/kray	18	Rusak Berat
59	Asbak Tinggi	2	Rusak Ringan
60	Intercom Unit	1	Rusak Berat
61.	Telephone (pabx)	1	Baik
62.	Pesawat Telephone	19	Baik 17 Dan Rusak Berat 2
63.	Facsimile	3	Baik 2 dan Rusak Berat 1
64.	Antene Shf Portable	2	Baik 1 dan Rusak Ringan 1
65.	Internet	1	Baik
66.	P.c Unit	39	Baik 38 dan Rusak Ringan 1
67.	Lap Top	10	Baik
68.	Printer (peralatan Personal Komputer)	38	Baik 29 dan Rusak Berat 5
69.	Scanner (peralatan Personal Komputer)	3	Baik
70	Peralatan Personal Komputer Lainnya	13	Baik
71.	Server	1	Baik
72.	Router	1	Baik
73.	Hub	1	Baik
74	Acces Point	9	Baik
75.	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 Kva	1	Baik
76.	Monografi	8402	Baik
77.	Piala	2	Baik
VIII.	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	2	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik

5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	3	Baik
7.	Ruang Panmud Pidana	1	Baik
8.	Ruang Panmud Perdata	1	Baik
9.	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
10.	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Baik
11	Ruang Kasubag Perencanaan ,IT dan Pelaporan	1	Baik
12.	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
13.	Ruang Jaksa	1	Baik
14.	Ruang Pos Pelayanan Hukum	1	Baik
15.	Ruang Ibu dan anak (laktasi)	1	Baik
16.	Ruang Arsip	1	Baik
17.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
18.	Ruang Tunggu Anak	1	Baik
19.	Ruang Ramah Anak / Laktasi	1	Baik
20.	Ruang Jaksa	1	Baik
21.	Ruang Tahanan	2	Baik
22	Ruang Mediasi / Diversi	1	Baik
23.	Ruang Ziiting platz	1	Lokasi di Maninjau kondisi baik
24.	Ruang Toilet	7	Baik
25.	Ruang Mushola	1	Baik
26.	Ruang Genset	1	Baik
27.	Ruang Penyimpanan	1	Baik
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer/PC	14	Baik
2	Laptop	9	Baik
3	Mesin Fotocopy	1	Rusak Ringan
4	AC	15	Baik
5	Faximile	1	Baik

6	Genset	1	Baik
7	Komputer lainnya	3	Baik
8	Printer	15	Baik
9	Scanner	2	Baik
10	Meja Rapat	1	Baik
11	Meja Komputer	4	Baik
12	PABX	1	
13	Server	1	Baik
14	Router	1	Baik
15	Meja Receptionis	1	Baik
16	Filing Cabinet	12	Baik
17	Lemari Besi Metal	6	Baik
18	Televisi	4	Baik
19	Sound System	1	Baik
20	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
21	Lemari Es	1	Baik
22	Wireless	1	Baik
23	Stabilizer	1	Baik
24	Gordyn	4	Baik
25	UPS	5	Rusak Ringan
26	Lemari Kayu	23	Baik
27	Rak Besi	5	Baik
28	Rak Kayu	4	Baik
29	Filing Cabinet	2	Baik
30	Brancash	1	Baik
31	Kipas Angin	11	Baik
32	CCTV	2	Baik
33	Papan Nama	1	Baik
34	Camera Digital	1	Baik

35	Mesin Absensi	2	Baik
36	Hand Metal Detector	1	Baik
37	Meja Kerja Kayu	36	Baik
38	Lemari Kayu	18	Baik
39	Roll Opek	3	Baik
40	Size	3	Baik
41	Kursi Besi Metal	107	Baik
42	Kursi Kayu	38	Baik
43	Bangku Panjang Kayu	9	Baik
44	Infocus	1	Baik
45	Server	1	Baik
46	Router	1	Baik
IX.	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	2	
7	Ruang Kepaniteraan	6	
8	Ruang Tamu	1	
9	Ruang Rapat	1	
10	Ruang Mediasi	1	
11	Ruang Sel Tahanan	3	
12	Ruang Tunggu Anak	2	
13	Ruang Klinik	1	
14	Ruang Jaksa	1	
15	Ruang Pengacara/Posyankum	1	

16	Ruang Tunggu Pengamanan Sidang	1	
17	Ruang Laktasi/Menyusui	1	
18	Musholla	1	
19	Ruang Kesekretariatan	5	
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer/PC	30	
2	Laptop	9	
3	Infokus	1	
4	Mesin Ketik	2	
5	Mesin Fotocopy	1	
6	AC	17	
7	Faximile	2	
8	Genset	1	
9	Komputer lainnya	1	
10	Printer	24	
11	Scanner	3	
12	Meja Rapat	4	
13	Meja Komputer	16	
14	Pesawat telepon	11	
15	Server	1	
16	Router	1	
17	Meja Receptionis	3	
18	Mobile File	3	
19	Lemari Besi Metal	16	
20	Televisi	2	
21	Sound System	2	
22	Mesin Pemotong Rumput	1	
23	Lemari Es	2	
24	Wireless	1	

25	Tangga Aluminium	1	
26	Gordyn	4	
27	UPS	5	
28	Kamera Digital	1	
29	Lemari Kayu	23	
30	Rak Besi	5	
31	Rak Kayu	4	
32	Filing Cabinet	2	
33	Brandcas	2	
34	Tabung Pemadam Api	3	
35	CCTV	2	
36	Papan Nama	12	
37	White Board	2	
38	Mesin Absensi	2	
39	Hand Metal Detector	2	
40	Meja Kerja Kayu	64	
41	Lambang Garuda	2	
42	Lambang Instansi	1	
43	Tiang Bendera	8	
44	Kursi Besi Metal	159	
45	Kursi Kayu	23	
46	Sice	5	
47	Bangku Besi Metal	30	
48	Rak Server	1	
49	Server	1	
50	Tempat Tidur Klinik	1	
X.	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR		
1.	Ruangan Ketua	1	-

2.	Ruangan Wakil Ketua	1	-
3.	Ruangan Hakim	1	-
4.	Ruangan Panitera	1	-
5.	Ruangan Sekretaris	1	-
6.	Ruangan Sidang Umum	2	-
7.	Ruangan Sidang Anak	1	-
8.	Ruangan Kepaniteraan Pidana	1	-
9.	Ruangan Kepaniteraan Perdata	1	-
10.	Ruangan Kepaniteraan Hukum	1	-
11.	Ruangan Kesekretariatan Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan	1	-
12.	Ruangan Kesekretariatan umum dan keuangan	1	-
13.	Ruangan Kesekretariatan kepegawaian, organisasi dan tata laksana	1	-
14.	Ruangan server	1	-
15.	Ruangan mediasi	1	-
16.	Ruangan posbakum	1	-
17.	Ruangan ibu menyusui dan kesehatan	1	-
18.	Ruangan tunggu anak dan teleconference	1	-
19	Ruangan tahanan pria	2	-
20	Ruangan tahanan wanita	1	-
21	Ruangan jaksa	1	-
22	Ruangan pengacara	1	-
23	Ruangan tunggu terbuka	1	-
24	Ruangan kasir	1	-
25	Ruangan panitera pengganti	1	-
26	Ruangan jurusita pengganti	1	-
27	Ruangan arsip	1	-
28	Ruangan Rapat	1	-
29	Ruangan Pembinaan	1	-

30.	Pantri	1	-
31	WC	19	-
32	Pustaka	1	-
33	Ruangan bermain anak	1	-
34	Smoking Area	2	-
35.	Gudang	3	-
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1.	Server	2	-
2.	Komputer	23	-
3.	Laptop	26	-
4.	Infokus	2	-
5.	PABX	50	-
6.	Mesin Ketik	12	-
7.	Mesin Fotocopy	2	-
8.	AC	56	-
9.	Faximili	2	-
10.	Genset	1	-
11.	Printer	43	-
12.	Lemari	40	-
13.	Kursi	179	-
14.	Meja komputer	12	-
15.	Brangkas	3	-
16.	Rak	6	-
17.	Filing Cabinet	8	-
XI.	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	

3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
7	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang PTIP	1	
11	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
12	Ruang Panitera Pengganti	1	
13	Ruang Jurusita	1	
14	Ruang Ajudan	1	
15	Ruang Sidang	3	
16	Ruang Tahanan	2	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Lobby	1	
19	Ruang Jaksa	1	
20	Ruang Advokat	1	
21	Ruang Polisi	1	
22	Ruang Menyusui	1	
Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer	34	Baik 19, Rusak 15
2	Laptop	12	Baik 11, Rusak 1
3	Printer	26	Baik 14, Rusak 12
4	Infocus	1	Baik
5	Sound System	4	Baik
6	Televisi	3	Baik
7	PABX	2	Baik 1, Rusak 1
8	Mesin Ketik	16	Baik 3, Rusak 13

9	Mesin Fotocopy	1	Rusak
10	Mesin Absensi	2	Baik 1, Rusak 1
11	AC	20	Baik 16, Rusak 4
12	Faximile	2	Baik 1, Rusak 1
13	Genset	1	Rusak
14	Racun Api	1	Baik
15	Lemari	58	Baik 36, Rusak 22
16	Meja Kerja	90	Baik 70, Rusak 20
17	Kursi	196	Baik 152, Rusak 44
XII. PENGADILAN NEGERI SOLOK			
1	Ruang Ketua	16 buah	
2	Ruang Wakil Ketua	9 buah	-
3	Ruang Hakim	28 buah	-
4	Ruang Panitera	17 buah	-
5	Ruang sekretaris	7 buah	-
6	Ruang wakil panitera	7 buah	-
7	Ruang pidana	35 buah	-
8	Ruang perdata	26 buah	-
9	Ruang hukum	14 buah	-
10	Ruang sidan 1	29 buah	-
11	Ruang sidan 2	25 buah	-
12	Ruang sidang anak	22 buah	-
13	Ruang Umum dan keuangan	34 buah	-
14	Ruang kepegawaian, organisasi dan tata laksana	21 buah	-
15	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	15 buah	-
16	Ruang mediasi	6 buah	-
17	Ruang tunggu ramah anak	4 buah	-
18	Ruang Jaksa	3 buah	-

19	Ruang Arsip	9 buah	-
20	Ruang pustaka	67 buah	-
21	Ruang posbakum	4 buah	-
22	Ruang tunggu	6 buah	-
23	Ruang Lobby	18 buah	-
24	Ruang kesehatan / ibu menyusui	4 buah	-
25	Ruang server	6 buah	-
26	Ruang rapat	16 buah	-
27	Ruang Tahanan	3 buah	-
SARANA / PRASARANA GEDUNG			
1	KENDARAAN RODA 4	3 UNIT	
2	KENDARAAN RODA 2	5 UNIT	
3	MESIN FOTOCOPY	2 BUAH	
4	INFOCUS	1 BUAH	
5	A.C SPLIT	20 UNIT	
6	KAMERA DIGITAL	2 UNIT	
7	VIDEO CONVERENCE	1 UNIT	
8	FAXIMILE	3 UNIT	
9	FABX	1 UNIT	
10	GENSET	1 UNIT	
11	PC UNIT	20 UNIT	
12	LAPTOP	15 UNIT	
13	SERVER	1 UNIT	
14	PRINTER	10 UNIT	
15	SCANNER	2 UNIT	
XIII. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU			
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	

3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang I/ Utama	1	
7.	Ruang Sidang II	1	
8.	Ruang Sidang Anak	1	
9.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
10.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
11.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12.	Ruang Umum dan Keuangan	1	
13.	Ruang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1	
14.	Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	
15.	Ruang Kesehatan dan Laktasi	1	
16.	Ruang Arsip Hukum	1	
17.	Ruang Tunggu Anak	1	
18.	Ruang Konseling	1	
19.	Ruang Tahanan Wanita	1	
20.	Ruang Tahanan Pria	1	
21.	Ruang Mediasi/ Diversi	1	
22.	Ruang Panitera Pengganti/ Jurusita	1	
23.	Mushalla	1	
24.	Toilet	3	
Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1.	Komputer	30	
2.	Laptop	5	
3.	Mesin Foto copy	1	
4.	AC	26	
5.	Faximile	2	
6.	Genset	1	

7.	Mesin Absensi	1	
8.	UPS	3	
XIV.	PENGADILAN NEGERI MUARO		
1.	Ruang Ketua	1	-
2.	Ruang Wakil Ketua	1	-
3.	Ruang Hakim	2	-
4.	Ruang Panitera	1	-
5.	Ruang Sekretaris	1	-
6.	Ruang Sidang Umum	2	-
7.	Ruang Sidang Anak	1	-
8.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
9.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
10.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
11.	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1	-
12.	Ruang Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1	-
13.	Ruang Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	-	Bergabung dengan Ruang Perpustakaan
14.	Ruang Perpustakaan	1	-
15.	Ruang Gudang Arsip Perkara	2	-
16.	Ruang Posbankum	1	-
17.	Ruang Jaksa	1	-
18.	Ruang Mediasi	1	-
19.	Toilet	5	-
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Komputer	28	-
2.	Laptop	7	-
3.	Infocus	1	-
4.	PABX	1	-

5.	Mesin Ketik	2	-
6.	Mesin Fotocopy	-	Tidak Ada
7.	AC	20	-
8.	Faximile	1	-
9.	Genset	1	-
10.	Printer	20	-
11.	Lemari (Besi/Kayu)	20	-
12.	Kursi (Besi/Kayu/Fiber/Plastik/Bangku Panjang)	50	-
13.	Si Ce	4 Set	
14.	Meja (Kerja/Rapat/Komputer/Besi/Kayu)	30	-
15.	Brankas	3	-
16.	Rak (Besi/Kayu)	10	-
17.	Filing Cabinet	5	-
XV.	PENGADILAN NEGERI PAINAN		
1	Ruang Ketua	1 ruang	—
2	Ruang Wakil Ketua	1 ruang	—
3	Ruang Hakim	1 ruang	Sekarang ditempati oleh 3 orang hakim
4	Ruang Panitera	1 ruang	—
5	Ruang Sekretaris	1 ruang	—
6	Ruang Sidang Umum	2 ruang	—
7	Ruang Sidang Anak	1 ruang	—
8	Ruang Perdata	1 ruang	—
9	Ruang Pidana	2 ruang	—
10	Ruang Hukum	2 ruang	—
11	Ruang Wakil Panitera	1 ruang	—
12	Ruang Umum & Keuangan	2 ruang	—
13	Ruang Kepegawaian	1 ruang	—
14	Ruang IT	2 ruang	—

15	Ruang Posbankum	1 ruang	–
16	Ruang Perpustakaan	1 ruang	–
17	Ruang Arsip	1 ruang	–
18	Ruang Tahanan laki-laki	1 ruang	–
19	Ruang Tahanan wanita	1 ruang	–
20	Ruang Pelayanan satu pintu	1 ruang	–
Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer	30 unit	13 unit rusak berat
2	Laptop	9 unit	Baik
3	PABX	1 unit	Rusak berat
4	Brand Kas	3 buah	1 buah rusak berat
5	Mesin fotocopy	1 unit	Rusak berat
6	AC	29 unit	5 unit rusak berat
7	Faximile	2 unit	Baik
8	Genset	1 unit	Baik
9	Dispenser	13 unit	12 unit rusak berat
10	Palu sidang	3 unit	Baik
11	Lambang instansi	1 buah	Baik
12	Power Supply	11 unit	Rusak berat
13	Camera Digital	1 unit	Baik
14	Printer	17 unit	6 unit rusak berat
15	Scanner	3 unit	Baik
16	Sever	1 unit	Baik
17	Router	1 unit	Baik
18	CCTV	1 unit	Baik
19	Lemari Kayu	33 unit	28 rusak berat
20	Papan Visual	2 unit	Baik
21	Mesin Absensi	1 unit	Baik
22	Hend Metal Detektor	1 unit	Baik

23	Jam Electronik	17 unit	Baik
24	Televisi	1 unit	Baik
25	Sound Sistem	1 unit	Baik
26	Mic Conference	2 unit	Baik
XVI. PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Kepaniteraan	3	
8	Ruang Tamu	1	
9	Ruang Rapat	1	
10	Ruang Mediasi	1	
11	Ruang Sel Tahanan	3	
12	Ruang Tunggu Anak	1	
13	Ruang Klinik	1	
14	Ruang Jaksa	1	
15	Ruang Pengacara/Posyankum	1	
16	Ruang Tunggu Pengamanan Sidang	1	
17	Ruang Laktasi/Menyusui	1	
18	Musholla	1	
19	Ruang Kesekretariatan	4	
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer/PC	14	
2	Laptop	7	
3	Mesin Fotocopy	1	

4	AC	17	
5	Faximile	1	
6	Genset	1	
7	Komputer lainnya	3	
8	Printer	6	
9	Scanner	2	
10	Meja Rapat	1	
11	Meja Komputer	4	
12	PABX	1	
13	Server	1	
14	Router	1	
15	Meja Receptionis	1	
16	Filing Cabinet	12	
17	Lemari Besi Metal	16	
18	Televisi	2	
19	Sound System	1	
20	Mesin Pemotong Rumput	1	
21	Lemari Es	1	
22	Wireless	1	
23	Stabilizer	1	
24	Gordyn	4	
25	UPS	5	
26	Kamera Digital	1	
27	Lemari Kayu	23	
28	Rak Besi	5	
29	Rak Kayu	4	
30	Filing Cabinet	2	
31	Brancash	1	
32	Kipas Angin	11	

33	CCTV	2	
34	Papan Nama	1	
35	Camera Digital	1	
36	Mesin Absensi	2	
37	Hand Metal Detector	1	
38	Meja Kerja Kayu	36	
39	Lemari Kayu	18	
40	Roll Opek	3	
41	Size	3	
42	Kursi Besi Metal	107	
43	Kursi Kayu	38	
44	Bangku Panjang Kayu	9	
45	Kasur Springbed	3	
46	Server	1	
47	Roter	1	
48	Lambang Instansi	1	
XVII.	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG		
1.	Ruang Ketua	1	-
2.	Ruang Wakil Ketua	1	-
3.	Ruang Hakim	2	-
4.	Ruang Panitera	1	-
5.	Ruang Sekretaris	1	-
6.	Ruang Sidang Umum	2	-
7.	Ruang Sidang Anak	1	-
8.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	-
9.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	-
10.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	-
11.	Ruang Bagian Umum dan Keuangan	1	-

12.	Ruang Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1	-
13.	Ruang Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	-
14.	Ruang Perpustakaan	-	-
15.	Ruang Gudang Arsip Perkara	1	-
16.	Ruang Posbankum	-	-
17.	Ruang Jaksa	-	-
18.	Ruang Mediasi	1	-
19.	Toilet	4	-
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1.	Server	1	Tmasfer dari Pengadilan Tinggi Padang
2.	Personal Computer (PC)	4	Sda
3.	Laptop/Notebook	2	Sda
4.	Lemari Arsip Dorong (Besi)	3	Sda
5.	Lemari Arsip 2 pintu (Besi)	7	Sda
6.	Printer	4	Sda
7.	Pinger Print/ Mesin Absensi	1	Sda
8.	AC Split (1 PK)	6	Sda
9.	Rak Arsip (Besi)	10	Sda
10.	Meja 1 Biro	4	Pinjam Pakai dari Pemerintahan daerah Kabuapten Dharmasraya.
11.	Meja 1/2 Biro	15	Sda
12.	Kursi Manager/ Chairman 701	4	Sda
13.	Kursi Kantor/ Chairman 703	15	Sda
14.	Kursi Pengunjung/ Futura	20	Sda
15.	Nlce/ Sofa	2	Sda
16.	Lemari Arsip Ukuran 100 x 40 x 200 cm	5	Sda
17.	Meja Hakim Sidang	2	Sda
18.	Meja Panitera	2	Sda

19.	Meja Penasihat Hukum	3	Sda
20.	Meja Jaksa	1	Sda
21.	Kursi Sidang Type Raja	3	Sda
22.	Kursi Panitera/ Chairman	2	Sda
23.	Kursi Penasihat Hukum	3	Sda
24.	Kursi Jaksa	2	Sda

2. Sarana/Prasarana Kantor

RUMAH DINAS

NO	PENGADILAN	KETUA	WAKIL KETUA	HAKIM	PANITERA	SEKRETARIS	JUMLAH	KONDISI		
								BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	Pengadilan Tinggi Padang	1	1	5	1	1	10	8	1	1
1	Pengadilan Negeri Padang	1	1	9	1	-	12	10	-	2
2	Pengadilan Negeri Pariaman	1	1	6	1	-	9	6	3	-
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1	1	14	1	-	16	1	8	7
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	1	9	1	1	13	12	-	1
5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	1	1	6	1	-	9	9	-	-
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	1	1	7	1	1	11	11	-	-
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	1	1	6	1	-				
8	Pengadilan Negeri Solok									
9	Pengadilan Negeri Painan									
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang									

11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1	1	4	1	-	7	7	-	-
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1	1	1	1	-	4	3	1	
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	1	4	1	1	8	8	-	-
14	Pengadilan Negeri Muaro	1	1	4	1	-	7	6	-	1
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	1	1	1	1	1	5	5	-	-
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung									

KENDARAAN DINAS

NO	PENGADILAN	KENDARAAN RODA 4				KENDARAAN RODA 2			
		KONDISI			JUMLAH	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
	Pengadilan Tinggi Padang	-	-	-	7	-	-	-	11
1	Pengadilan Negeri Padang	3	-	-					
2	Pengadilan Negeri Pariaman								
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi								
4	Pengadilan Negeri Sawahlunto								

5	Pengadilan Negeri Payakumbuh	3	-	-	3	5	-	-	5
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	2	-	-	2	5	1	-	6
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	4	-	-	4	7	1	-	8
8	Pengadilan Negeri Solok	4	-	-	4	5	-	-	5
9	Pengadilan Negeri Painan								
10	Pengadilan Negeri Padang Panjang	2	1	-	3		7	1	8
11	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	2	-	-	2	6	1		7
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	3	-	-	3	8	-	1	9
13	Pengadilan Negeri Koto Baru	1	-	-	1	6	-	-	6
14	Pengadilan Negeri Muaro	4	-	-	4	10	-	-	
15	Pengadilan Negeri Pasaman Barat								
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung								

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI



Teknologi informasi sekarang ini berkembang dengan pesat. Pemanfaatan teknologi informasi sudah mencapai berbagai bidang kehidupan masyarakat. Teknologi informasi memudahkan para penggunanya dalam mencatat suatu transaksi, menyimpannya dalam bentuk data, mentransformasikannya menjadi informasi dan menyebarkannya kepada para pemakai informasi. Teknologi informasi memiliki banyak peranan dalam membantu dan memecahkan masalah, diantaranya membantu dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, mutu, kreativitas, dan problem solving (pemecahan masalah). Dengan dukungan teknologi informasi, kita dapat melakukan pemecahan masalah dengan cepat dan efektif, termasuk di dunia peradilan seperti Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat.

1. Implementasi e-Court di Pengadilan

Ecourt merupakan sebuah Sistem Informasi Pengadilan yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yaitu Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik diubah jo Perma Nomor 1 tahun 2019

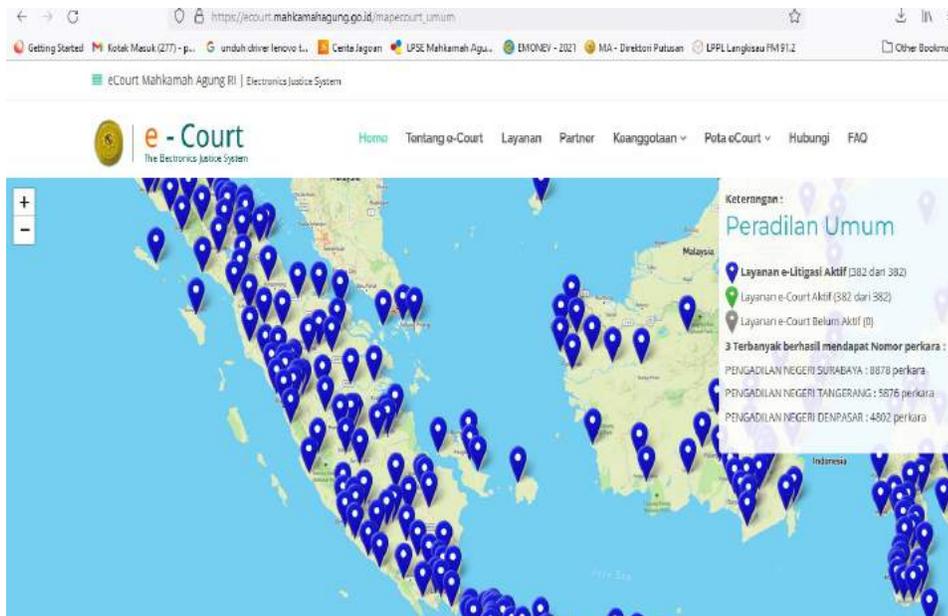
yaitu Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Aplikasi ecourt merupakan sebuah sistem terpusat, artinya aplikasi tersebut berada dalam server Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga tidak perlu di instal di masing-masing server maupun website Pengadilan.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di

tingkat pertama. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 4 ruang lingkup yaitu, e-filing (pengisian data pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar perkara), e-summons, (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili elektronik), e-litigasi (persidangan secara online). E-Court baru terlaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama, sementara untuk Pengadilan Tingkat Banding belum ada. Secara keseluruhan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat telah menerapkan Aplikasi e-Court ini dalam hal pendaftaran, dan persidangan secara online. Selama tahun 2021 Pengadilan Negeri yang memasukkan pendaftaran melalui e-court dapat dilihat pada tabel berikut:

PETA E-COURT PENGADILAN NEGERI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG



**DAFTAR PERKARA PENGADILAN NEGERI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

NO	SATUAN KERJA	PENDAFTARAN (DIBAYAR)	BERHASIL NOMOR PERKARA	PERKARA GUGATAN	PERKARA GUGATAN SEDERHANA	PERKARA BANTAHAN	PERMOHONAN	TOTAL E-LITIGASI
1	PN PADANG	1182	1172	437	98	17	620	140
2	PN PAINAN	114	101	86	10	3	2	13
3	PN KOTOBARU	123	121	51	20	5	45	15
4	PN SOLOK	178	177	31	5	1	140	5
5	PN SAWAHLUNTO	31	30	7	5	0	18	1
6	PN MUARO	55	55	10	26	0	19	1
7	PN PADANG PANJANG	65	65	18	3	1	43	4
8	PN BATUSANGKAR	135	134	65	9	1	59	8
9	PN BUKITTINGGI	225	224	87	8	2	127	34
10	PN PAYAKUMBUH	190	185	66	4	4	111	33
11	PN TANJUNG PATI	94	91	32	2	3	54	4
12	PN PARIAMAN	301	299	158	32	5	104	49
13	PN LUBUK BASUNG	192	189	78	58	0	53	45
14	PN PASAMAN BARAT	522	519	105	32	0	382	25

15	PN LUBUK SIKAPING	74	73	35	0	0	38	6
----	-------------------	----	----	----	---	---	----	---

Sepanjang Tahun 2021, Pengadilan Tinggi telah melayani 47 (Empat puluh tujuh) Perkara Banding Perdata E-Court dengan Rincian sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	Banding E-Court
1	PN PADANG	21
2	PN PARIAMAN	6
3	PN PAINAN	2
4	PN LUBUK BASUNG	6
5	PN PADANG PANJANG	2
6	PN BUKITTINGGI	5
7	PN BATUSANGKAR	4
8	PN PULAU PUNJUNG	1

2. Implementasi SIPP di Pengadilan

Melalui dukungan teknologi informasi, Pengadilan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sampai saat ini Pengadilan Tinggi Padang beserta satuan kerja dibawahnya yakni Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat, secara keseluruhan telah

menerapkan SIPP versi 4.0.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Padang maupun SIPP Mahkamah Agung dan juga Direktori Putusan Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya. Jaringan yang digunakan di Pengadilan Tinggi Padang meliputi :

- 1) LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel pada beberapa ruangan.
- 2) Jaringan Internet Speedy kapasitas 4 Mbps (2 line telepon) yang di-*sharing* untuk 2 lantai menggunakan WiFi.

Pada tahun 2021, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sudah diupdate ke versi 4.0.1. Ketersediaan perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Pejaminan Mutu (APM)

Untuk melakukan perubahan saat ini Pengadilan Tinggi Padang membulatkan tekad, dan memulai memetakan (*mapping*) potensi sumber daya, kekuatan, kelemahan dan resistensi. Selanjutnya beragam langkah dilakukan agar semua kelemahan dapat diatasi dengan kekuatan yang ada.

Langkah-langkah pembenahan telah dilakukan di Pengadilan Tinggi Padang, serta mengelompokkan menjadi sebelas kegiatan, yaitu:

- Pembinaan/sosialisasi terus menerus. Pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*).
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Hakekat akreditasi merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka sasaran hasil utama Reformasi

Birokrasi meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari KKN serta peningkatan pelayanan publik.

- Pembangunan Zona Integritas. Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas secara terbuka. Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik.
- Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna.
- Pembenahan Administrasi. Acuanya adalah Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari, tetapi umumnya tetap banyak yang terlupakan. Untuk pembenahan administrasi ini, Pengadilan Tinggi Padang mengandalkan aplikasi-aplikasi, baik yang merupakan aplikasi resmi dari Mahkamah Agung, maupun aplikasi dari instansi eksternal.
- Pembuatan dan pengesahan Dokumen Penjaminan Mutu. Dokumen ini meliputi Sasaran Mutu, Kebijakan Mutu, Motto, Struktur Organisasi

Penjaminan Mutu, Manual Mutu, Instruksi Kerja (IK), Manajemen Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit. Untuk efektifitas penyusunan maka Pengadilan Negeri Pariaman sudah membentuk Tim Penyusunan SOP dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Penyusunan SOP berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Seyogyanya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan.

- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.
- Pelaksanaan Audit Internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.
- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen. Rapat Tinjauan Manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.
- Audit oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan audit oleh TAPM Badilum, maka harus meminta audit oleh Pengadilan Tinggi. Rekomendasi

Pengadilan Tinggi harus segera ditindaklanjuti. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan audit akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon Audit Akreditasi TAPM Badilum.

- Sebelum diberi penilaian atau pun diaudit, Pengadilan Tinggi Padang melaksanakan pembinaan yang berbarengan dengan pengawasan ke seluruh satuan kerja yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang (Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat) yaitu terdapat 16 (enam belas) Pengadilan Negeri. Dimana untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut terdapat Anggaran pada DIPA 01 sebesar Rp.131,802,000,- Dan DIPA 03 Sebesar Rp.174.845.000,- dari total anggaran tersebut sudah terealisasi 99%. Hal ini merupakan capaian bagi Pengadilan Tinggi Padang terutama terhadap kinerja yang telah terealisasikan dengan sangat baik.
- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan tersebut telah dilakukan sesuai jadwal sebagaimana berikut:

Jadwal Pengawasan Semester I

NO	NAMA SATKER	TANGGAL	KET.
1.	PN PADANG	6/09/2021	
2.	PN PARIAMAN	02/09/2021 S/D 03/09/2021	
3.	PN PAINAN	22/03/2021 S/D 23/03/2021	
4.	PN SOLOK	22/03/2021 S/D 23/03/2021	
5.	PN KOTO BARU	13/03/2021 S/D 14/03/2021	

6.	PN PADANG PANJANG	14/06/2021 S/D 15/06/2021	
7.	PN BATUSANGKAR	07/06/2021 S/D 08/06/2021	
8.	PN BUKITTINGGI	30/06/2021 S/D 01/07/2021	
9.	PN LUBUK BASUNG	26/08/2021 S/D 27/08/2021	
10.	PN PAYAKUMBUH	07/09/2021 S/D 08/09/2021	
11.	PN MUARO	26/08/2021 S/D 27/08/2021	
12.	PN SAWAHLUNTO	16/06/2021 S/D 17/06/2021	
13.	PN TANJUNG PATI	28/06/2021 S/D 29/06/2021	
14.	PN LUBUK SIKAPING	31/03/2021 S/D 01/04/2021	
15.	PN PASAMAN BARAT	05/07/2021 S/D 06/07/2021	
16.	PN PULAU PUNJUNG	29/07/2021 S/D 30/07/2021	

Jadwal Pengawasan Semester II

NO	NAMA SATKER	TANGGAL	KET.
1.	PN PADANG	07/12/2021	
2.	PN PARIAMAN	29/11/2021 S/D 30/11/2021	
3.	PN PAINAN	15/11/2021 S/D 16/11/2021	
4.	PN SOLOK	11/11/2021 S/D 12/11/2021	
5.	PN KOTO BARU	13/12/2021 S/D 14/12/2021	
6.	PN PADANG PANJANG	15/11/2021 S/D 16/11/2021	
7.	PN BATUSANGKAR	07/11/2021 S/D 08/11/2021	
8.	PN BUKITTINGGI	25/11/2021 S/D 26/11/2021	
9.	PN LUBUK BASUNG	25/11/2021 S/D 26/11/2021	

10.	PN PAYAKUMBUH	08/12/2021 S/D 09/12/2021	
11.	PN MUARO	09/12/2021 S/D 10/12/2021	
12.	PN SAWAHLUNTO	23/11/2021 S/D 24/11/2021	
13.	PN TANUNG PATI	28/11/2021 S/D 29/11/2021	
14.	PN LUBUK SIKAPING	06/12/2021 S/D 07/12/2021	
15.	PN PASAMAN BARAT	08/12/2021 S/D 09/12/2021	
16.	PN PULAU PUNJUNG	13/12/2021 S/D 15/12/2021	

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan terhadap dunia peradilan, maka Mahkamah Agung sendiri telah memerintahkan seluruh jajaran peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program Mahkamah Agung R.I dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Pengadilan Tinggi Padang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyediakan pelayanan yang terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan. Pelayanan PTSP terbagi kepada 2 (dua) bagian,

yaitu: Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan pelayanan dengan menyediakan fasilitas seperti kursi roda, tempat parkir khusus disabilitas dan memberikan pelayanan dengan kartu tamu prioritas.

Sementara itu tentang PTSP ini telah diterapkan pula kepada seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Padang. Pada tahun 2021, ada 2 Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan penghargaan dalam penilaian lomba PTSP yang dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yaitu:

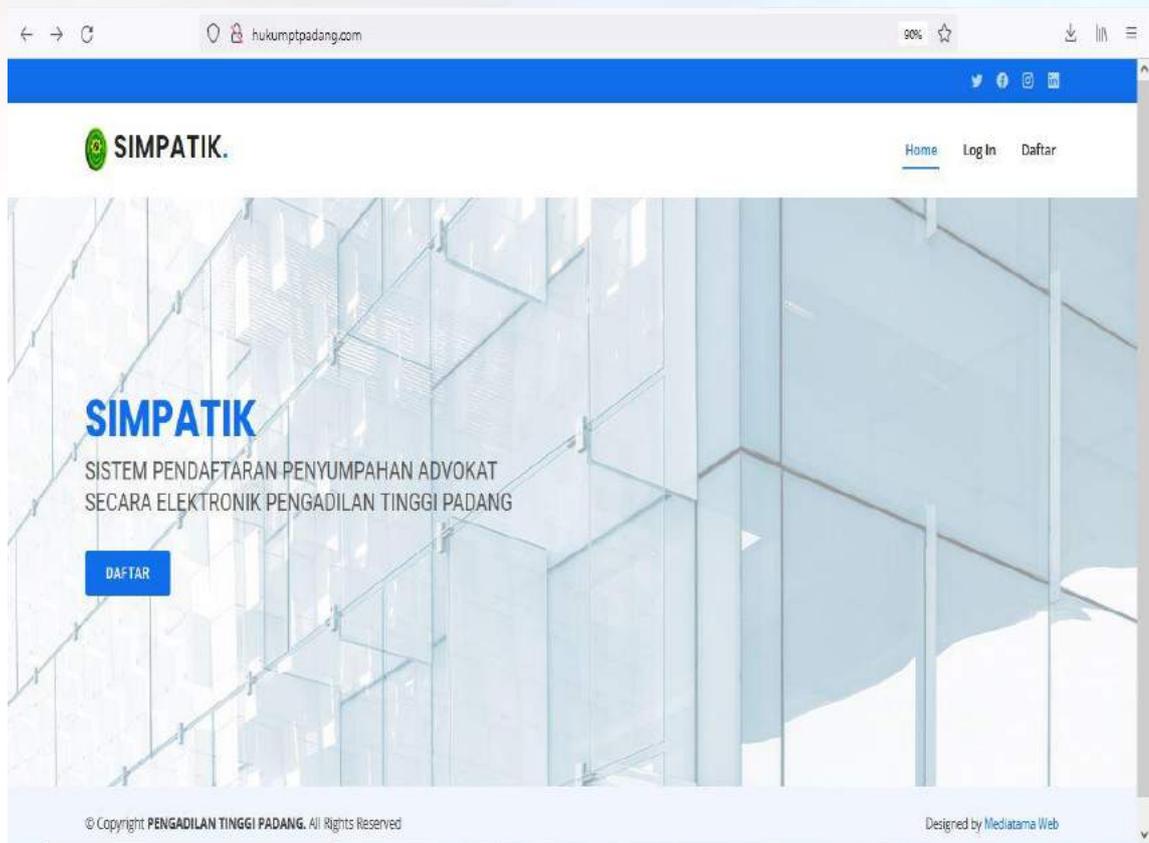
NO	Pengadilan Negeri	Peringkat	Kategori
1.	Pengadilan Negeri Padang	Harapan II	PTSP Terbaik se-Indonesia
2.	Pengadilan Negeri Pariaman	Harapan III	PTSP Terbaik se-Indonesia

C. Inovasi Pelayanan Publik

Ada beberapa inovasi terkait pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2021 baik berupa aplikasi atau berupa program kegiatan yang tujuannya memudahkan masyarakat pencari keadilan dan instansi terkait untuk mendapatkan pelayanan terkait produk hukum dari Pengadilan Tinggi Padang. Berikut beberapa inovasi yang telah berjalan pada Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2021 :

1. SIMPATIK

Simpatik merupakan aplikasi untuk mempermudah pendaftaran advokat secara online dan segera mendapatkan jadwal untuk dilakukan penyempahan.



TAHUN 2021

No.	Nama Organisasi	Tanggal penyempahan	Jumlah penyempahan	Ket
1.	PERADI	29 JANUARI 2021	49 ORANG	
2.	PERADIN	5 MARET 2021	14 ORANG	
3.	PPKHI	5 MARET 2021	11 ORANG	
4.	IKADIN	12 APRIL 2021	7 ORANG	
5.	PERADIN	15 SEPTEMBER 2021	1 ORANG	
6.	PERADAN	21 OKTOBER 2021	1 ORANG	

7.	PERADI	25 NOVEMBER 2021	99 ORANG	
8.	PPKHI	25 NOVEMBER 2021	10 ORANG	
JUMLAH			192	

2. SIPEDANG

Pengawasan bidang yang dilakukan selama ini di Pengadilan Tinggi Padang masih menggunakan cara manual sehingga kurang efektif dan efisien. Pengawasan Bidang dilakukan dengan cara Tim Pengawas mendatangi ruangan-ruangan Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan pemeriksaan kemudian setelah itu membuat catatan-catatan terhadap temuan dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Semua hal itu dilakukan dengan cara lama sehingga kadang ditemukan adanya perbedaan format dalam laporan hasil pemeriksaan atau lewatnya waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan bidang tersebut. Oleh karena itulah Sipedang hadir untuk lebih mempermudah dan lebih menghemat waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan hasil tindak lanjut temuannya.

SIPEDANG diperuntukkan untuk memberikan kemudahan bagi Bapak/Ibu Hakim Tinggi dalam melakukan pengawasan dan bagi para Penitera Muda dan Kepala Sub Bagian dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

Dengan adanya SIPEDANG maka pengawasan bidang yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Padang akan terlaksana lebih efektif dan lebih efisien dimulai dari Pengawasan oleh Bapak.Ibu Hakim Tinggi sampai dengan pembuatan laporan dan mempercepat para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.

INOVASI PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	Nama Satker	Inovasi	Keterangan
1	Pengadilan Negeri Kotobaru	<ul style="list-style-type: none"> - Pangsud (Panggilan Sidang) - Mext SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebuah inovasi yang memudahkan jalannya persidangan dimana Aplikasi ini membuat panggilan bagi para pihak, jaksa penuntut umum, panitera pengganti maupun majelis hakim untuk memulai agenda persidangan pada Ruang Sidang Tertentu tanpa bantuan operator untuk memanggil para pihak yang berperkara. - Aplikasi MExt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP, Aplikasi ini berbasis Smartphone Android yang memudahkan mengetahui informasi jadwal sidang, antrian sidang, informasi denda tilang, informasi data perkara, informasi putusan dan akses kedalam aplikasi external Mahkamah Agung seperti akses aplikasi

			ecourt, akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi Siwas, akses aplikasi SIPP web.
2	Pengadilan Negeri Muaro	<ul style="list-style-type: none"> - Sentrik (Aplikasi Sistem Antrian Pada Meja PTSP secara Elektronik) - Si Edo (Sistem Informasi E-Dokumen) - KDSlip 	
3	Pengadilan Negeri Payakumbuh	- SIJANIAH (Sistem Informasi Jendela Layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh)	- Aplikasi SIJANIAH akan menampilkan berbagai informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh termasuk Penelusuran Informasi Perkara, Aplikasi ini bersifat eksternal yang dapat diakses oleh masyarakat Pengguna Layanan dengan menggunakan smarphone dan terinstal pada app Play Store.
4.	Pengadilan	- Aplikasi	- Aplikasi dashboard ini akan

	<p>Negeri Tanjung Pati</p>	<p>Dashboard Pengadilan Negeri Tanjung Pati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi e-tilang - Aplikasi SiAnida (Sistem Informasi Antar Instansi Daerah). 	<p>menampilkan rasio penanganan perkara yang berasal dari proses penanganan perkara di SIPP. Inovasi ini memudahkan hakim dan panitera pengganti dalam melakukan kontrol terhadap proses perkara yang sedang dalam persidangan. Selain itu pada tampilan dashboard juga terdapat menu atau shortcut untuk mengakses jadwal sidang dan aplikasi-aplikasi lainnya yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai PERMA No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Perkara Lalu-lintas, maka proses penyelesaian perkara lalu-lintas tidak perlu lagi dengan persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan pelanggar cukup mengetahui denda tilang dan mengambil barang bukti pada Kejaksaan Payakumbuh. Maka untuk
--	-----------------------------------	--	--

			<p>memudahkan pelanggar dalam mengetahui denda tilang tanpa harus datang, Pengadilan Negeri Tanjung Pati sudah memiliki inovasi berupa sebuah aplikasi e-tilang yang berisikan informasi data pelanggar dan jumlah denda yang harus dibayar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebuah aplikasi integrasi antar instansi daerah seperti kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, kepolisian dan dinas capil, dalam penyampaian salinan putusan, perpanjangan penahanan, izin sita dan geledah serta izin besuk, izin keluar dan izin bantaran, surat dakwaan dan surat tuntutan.
5	Pengadilan Negeri Sawahlunto	- Aplikasi SIDONA (Aplikasi Dokumen Zona Integritas)	- Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengumpulan laporan bulanan pengembangan kompetensi pegawai yang akuntabel dan dokumen berupa SK, notulen rapat, SOP dan PKP untuk semua

		<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi E-SIAP 	<p>pegawai yang bermanfaat dalam pengumpulan dokumen zona integritas maupun kepentingan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi yang merupakan channel dalam basis platform telegram yang digunakan untuk berbagi dokumen elektronik seputar perkara pidana.
6	Pengadilan Negeri Padang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Pelayanan Si Sari 	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Si Sari merupakan salah satu inovasi terbaru dari Pengadilan Negeri Padang Panjang bagi warga Kota Padang Panjang, Dengan adanya inovasi Si Sari, Pengajuan permohonan, persidangan dan pengambilan salinan penetapan dilakukan hanya dalam 1 (satu) hari saja.
7	Pengadilan Negeri Batusangkar	<ul style="list-style-type: none"> - MInt SIPP (Monitoring Internal - Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi MInt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk tenaga teknis dan bagian kepaniteraan Pengadilan

		<ul style="list-style-type: none"> - Mext SIPP (Monitoring External - Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 	<p>Negeri, Terkhusus lagi untuk Hakim, Panitera dan Jurusita serta tenaga non teknis pengadilan yang mempunyai hak akses pada aplikasi SIPP lokal pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi MExt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk para pihak yang sedang berperkara, untuk jaksa, pengacara dan masyarakat umum.
8	Pengadilan Negeri Solok	<ul style="list-style-type: none"> - E-DEPE (Delivery Penetapan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan aplikasi pengiriman penetapan tentang perubahan nama/akta kelahiran, akta kematian, dan akta cerai setelah penetapan dibacakan langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota solok pada hari yang sama
9	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	<ul style="list-style-type: none"> - PANGSID 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi ini adalah Aplikasi yang di gunakan untuk Panggilan sidang bagi Para Pihak yang berpekara.

10	Pengadilan Negeri Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Permohonan Izin /Persetujuan Terpadu (SPRINTER) - Mobile SIPP (MInt SIPP dan MExt SIPP) - Pengembalian Sisa Panjar Otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Didalam praktek sehari-hari Pengadilan Negeri Padang sering mengalami hambatan dalam pengurusan permohonan atau persetujuan izin penyitaan diantaranya adalah kekurangan syarat-syarat untuk dapat disetujuinya penerbitan surat penetapan persetujuan izin penyitaan. Mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang maka hal ini menjadi kendala dalam penerbitan surat penetapan persetujuan izin penyitaan dan akan bermuara pada lambatnya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. - Pengadilan Negeri Padang menyediakan layanan akses ke SIPP melalui aplikasi Mint SIPP untuk aparatur PN Padang dan Mext SIPP untuk masyarakat pencari keadilan. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat dapat memantau perkembangan perkara di Pengadilan
----	--------------------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) - Sistem Pelayanan PTSP Jarak Jauh (SIPATUAH) - Sistem Kerjasama Pelayanan 	<p>Negeri Padang melalui perangkat ponsel android mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu inovasi layanan lain dari Pengadilan Negeri Padang adalah melaksanakan pengembalian sisa panjar otomatis ke rekening pihak pencari keadilan pada hari perkara diputus. Sistem ini diberikan khusus untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court dengan mengisikan nomor rekening tujuan untuk pengembalian sisa panjar. Dengan adanya sistem ini, pihak pencari keadilan tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan uang sisa panjar perkara mereka. - Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan penerapan SNI ISO 37001:2016. Pembacaan penerapan SMAP dihadapan para pihak yang berperkara pada sidang
--	--	---	---

		<p>Peradilan Cepat dan Biaya Ringan Online (SIJEMPOL)</p>	<p>pertama oleh majelis hakim. Pembacaan penerapan SMAP ini juga ikut dituliskan pada berita acara sidang oleh Panitera Pengganti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan media elektronik untuk memudahkan dan mempercepat dalam memberikan pelayanan secara online. Layanan yang tersedia diantaranya permohonan salinan atau petikan putusan, permohonan fotocopy salinan putusan, permohonan legalisir fotocopy turunan putusan, permohonan penelitian, riset, atau magang, serta layanan terima surat online. Masyarakat cukup mengajukan permohonan secara online dan datang ke PTSP PN Padang untuk mengambil produk layanan. - Sijempol merupakan layanan yang memudahkan pendaftaran perkara dan permohonan surat keterangan secara online. Sistem ini juga menyediakan
--	--	--	--

			bantuan layanan berupa layanan zoom meeting agar masyarakat terhubung dan tatap muka dengan petugas Pengadilan Negeri Padang.
11	Pengadilan Negeri Pariaman	- Aplikasi Sistem Rating Pelayanan (SiRana)	- aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan yang diterimanya. Setelah pengunjung selesai menerima layanan, petugas langsung mengarahkan untuk memberikan penilaian melalui aplikasi dengan cara memilih berapa banyak bintang sesuai dengan pendapatnya.
	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	- DIVA (Digital Virtual Asisten) - Kerjasama pelayanan secara elektronik (Ksatrio Sirancak)	- aplikasi Autorespon (Penjawab Otomatis) Chat di Sosial media untuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang informasi perkara dan informasi lain khususnya di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, juga untuk internal Pengadilan Negeri Pasaman Barat. - Aplikasi Kstario Sirancak adalah singkatan dari kerjasama pelayanan secara

			<p>Telegram.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Pengembalian perkara secara online melalui rekening otomatis. Pihak yang berperkara di pengadilan dapat mengajukan sisa panjar melalui aplikasi Sparing dengan cara buka aplikasi Diva dengan nomor Whatsapp 08528166652 kemudian ketik SPARING maka akan keluar formulir goggle Form dan isi data yang diminta maka aplikasi akan memproses secara otomatis untuk pengembalian sisa panjar tersebut. - Aplikasi ini memudahkan pengguna layanan untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu melalui website Pengadilan Negeri Pasaman Barat ataupun melalui internet sebelum datang ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Sehingga ketika Pengguna layanan datang ke Pengadilan Negeri Pasaman
--	--	--	--

			Barat dapat langsung dilayani tanpa harus antri lama di depan meja PTSP Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
13	Pengadilan Negeri Bukittinggi	<ul style="list-style-type: none"> - SIPETI (Sistem pendataan dan pemeliharaan perangkat TI) - Mint SIPP (Monitoring Internal Sistem Informasi Penelusuran Perkara) - Mext SIPP (Monitoring Exterternal Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pendataan dan pemeliharaan perangkat TI ini digunakan untuk melakukan pemeliharaan perangkat TI setiap bulannya. Yang mana dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan atau pergantian perangkat TI yang rusak. - Aplikasi Mint SIPP merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk tenaga teknis dan bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri, mulai dari Hakim, Panitera dan Jurusita serta Tenaga Non Teknis yang mempunyai akses ke SIPP lokal pengadilan. - Aplikasi Mext SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuat khusus untuk para pihak yang sedang

			berperkara, untuk Jaksa, Pengacara, dan Masyarakat Umum.
14	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	- Aplikasi Panggilan Sidang	- Aplikasi Panggilan Sidang beserta perangkat Audio untuk menunjang aplikasi Panggilan Sidang, agar masyarakat umum, jaksa dan pengacara bisa mengetahui ketika mereka dipanggil.
15	Pengadilan Negeri Painan	- Aplikasi Antrian Pelayanan terpadu Satu Pintu	- Aplikasi antrian ini agar masyarakat/ pencari keadilan mendapatkan kenyamanan dalam antrian.

BAB VI

PENGAWASAN



BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan terhadap kinerja baik dalam bidang Yustisial maupun Non Yustisial dilaksanakan dengan seksama dan wajar yang berpedoman pada asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan pengawasan baik dalam bidang teknis maupun bidang administrasi yang meliputi :

1. Metode Pengawasan

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI (*voorpost*), Ketua Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan menggunakan Metode Pengawasan yang dilakukan antara lain :

- a. Inspeksi secara rutin dan mendadak hal ini dilakukan terhadap administrasi keuangan maupun administrasi perkara.
- b. Meminta laporan secara priodek (berkala) terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan melalui Hakim Pengawas Bidang yang meliputi bidang Teknis Yustisial yaitu bidang Kepaniteraan dan Kejurusitaan serta keuangan perkara, selain itu juga Hakim Pengawas Bidang Juga bertugas melakukan pengawasan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan bagian Umum dan Keuangan yang sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

- c. Laporan khusus diminta jika ada masalah tertentu yang perlu penyelesaian segera atau mendapatkan hal-hal yang baru dan perlu pemecahan.

2. Pengawasan Secara Berkala

Selain hal tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan penilaian khusus kepada Hakim dan Panitera serta Panitera Pengganti setiap tahunnya melalui penilaian SKP hal ini dilakukan tiap-tiap akhir tahun khusus untuk hakim penilaian dilakukan di dalam dinas maupun di luar kedinasan hal ini untuk menjaga dan meningkatkan citra hakim di mata publik.

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara *Preventif* dan *Represif*, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu. Pengawasan secara internal pada Pengadilan Tinggi Padang secara umum

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang dibantu oleh wakil Ketua, meliputi:

1. Semua tingkah laku para Hakim, Panitera/Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga menunjuk Hakim pengawas masing-masing bidang dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti apakah semua perkara ditangani telah sesuai dengan SOP.
5. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing.

Untuk pengawasan dan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat telah dilakukan secara periodik oleh Pengadilan Tinggi Padang yang dalam kurun waktu Tahun 2021.

**REKAP HASIL PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI SE SUMBAR
PADA TAHUN 2021 SEMESTER I (SATU)**

REKAP HASIL PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI SESUMBAR						
NO	NAMA SATKER	TANGGAL LHP	LHP	TANGGAL TLHP	TLHP	KET.
1.	PN PADANG	6/09/2021	<p>1. Dalam Register Pidana terhadap perkara yang berkekuatan hukum tetap pada kolom 23 tentang tanggal penerimaan salinan berita acara pelaksanaan Putusan kosong.</p> <p>2. Pengisian laporan lembar kerja (e-LLk) PN Padang belum dilaksanakan oleh semua Pegawai Pengadilan Negeri Padang</p>	20/09/2021	<p>1. Telah disurati kepada kepala kejaksaan Negeri Padang dengan nomor surat W3.U1/3455/HK.01/ix/2021 tanggal 27 September 2021 perihal permintaan Berita acara Pelaksanaan Putusan.</p> <p>2. Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana telah menggunakan Aplikasi Whastsapp Grup untuk mengingatkan pegawai setiap hari untuk</p>	

					membuat laporan Lembar kerja (e-LLK dan akan dilakukan sosialisasi kembali untuk Pengisian Aplikasi eLLk sesuai rekomendasi Pengadilan Tinggi Padang	
2.	<u>PN PARIAMAN</u>	02/09/2021 S/D 03/09/2021	1. Belum terpampang panjar biaya perkara perdata di area PTSP 2. Ketua Pengadilan Negeri jarang memeriksa kas secara mendadak.	17/09/2021	1. Sudah terpampang panjar biaya perkara di area PTSP 2. Ketua Pengadilan Negeri setiap bulannya sudah melakukan pemeriksaan mendadak.	
3.	<u>PN PAINAN</u>	22/03/2021 S/D 23/03/2021	1. Penyetoran PNBPN dari kasir ke Bendahara penerimaan terlambat belum sesuai aturan 2. Rencana Assesmen Internal belum dibuat sesuai dengan form yang dikeluarkan Badilum	15/04/2021	1. Sudah dilakkan perbaikan sebagaimana mestinya. 2. Sudah dilakkan perbaikan sebagaimana mestinya	
4.	<u>PN SOLOK</u>	22/03/2021 S/D 23/03/2021	1. Layanan meja PTSP posisinya masih berada di samping, tidak di bagian depan atau lobi kantor.	07/04/2021	1. Sudah ditindaklanjuti akan tetapi mengalami kendala untuk melakukan pemindahan Meja PTSP pada posisi	

			<p>2. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja belum semuanya dibuat untuk tiap jabatan yang ada di Pengadilan Negeri Solok</p>		<p>depan/lobi, hal ini disebabkan oleh Struktur Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Solok, dimana ukuran panjang Meja PTSP dengan ruang di depan/lobi tidak sama (ukuran lobi lebih kecil) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemindahan,</p> <p>2. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Pengadilan Negeri Solok agar dibuatkan semuanya untuk tiap jabatan sudah ditindak lanjuti</p>	
5.	PN KOTO BARU	13/03/2021 S/D 14/03/2021	<p>1. Masih Banyak berita Acara sidang yang belum di upload ke dalam SIPP</p> <p>2. Adanya keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan dinas</p>	27/04/2021	<p>1. Sudah ditindak lanjuti oleh .Panitera pengganti sudah meng upload berita acara sidang di SIPP</p> <p>2. Pembayaran pajak dilakukan pada tepat waktu dan sudah ditindak lanjuti</p>	

6.	PN PADANG PANJANG	14/06/2021 S/D 15/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan (SK) Pengelola BMN tahun 2021 belum di Update 2. Pengembalian sisa panjar biaya perkara belum ada surat permohonan dari pemohon pengembalian 	30/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dibuatkan Surat Keputusan tersebut sebagaimana mestinya. 2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2008, Keputusan KMA No. 26/KMA/SK/ II/2012 Tahun 2012 dan hasil pengawasan Tim Badan Pengawasan menentukan bahwa surat permohonan pengembalian sisa panjar tidak ada aturannya, jadi tidak diberlakukan. Karena yang ada hanya Surat Pemberitahuan Pengambilan Sisa Panjar yang dikirim oleh Kasir kepada pihak terkait
7.	PN BATUSANGKAR	07/06/2021 S/D 08/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan register induk pidana tahun 2020 untuk bulan November tidak dilakukan penutupan oleh petugas register 2. Pengadilan Negeri 	22/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas register sudah melakukan penutupan register pada bulan November 2020.

			Batusangkar belum pernah melakukan evaluasi SOP		2. Petugas SOP sudah melakukan evaluasi terhadap SOP tersebut.	
8.	PN BUKITTINGGI	30/06/2021 S/D 01/07/2021	1.	21/07/2021	1.	
9.	PN LUBUK BASUNG	26/08/2021 S/D 27/08/2021	1. Belum ada terpampang daftar mediator dan alur mediasi dinding yang disertai dengan photo di ruang mediasi; 2. Bagian kepegawaian Pengadilan negeri Lubuk Basung belum pernah melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap SKP para pegawai	19/05/2021	1. Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah membuat daftar Mediator dan alur mediasi. 2. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memerintahkan Bagian kepegawaian harus melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap SKP para pegawai agar terkontrol dan mengetahui sampai jauh mana kinerja para pegawai	
10.	PN	07/09/2021	1. Kolom keterangan dalam	22/09/2021	1. Petugas sudah mengisi	

	PYAKUMBUH	S/D 08/09/2021	<p>buku Register Induk Perdata tidak dibuat tanggal penyerahan berkas ke Panitera Muda Mukum.</p> <p>2. SOP bagian kepegawaian belum dievaluasi</p>		<p>tanggal pada kolom keterangan dalam buku register.</p> <p>2. Bagian kepegawaian sudah melakukan evaluasi SOP</p>	
11.	PN MUARO	26/08/2021 S/D 27/08/2021	<p>1. Dalam perkara no. 3/Pdt.GS/2021/PN MR surat kuasa penggugat masih bersifat umum</p> <p>2. Kartu control perangkat elektronik tidak diisi sehingga tidak diketahui jadwal perawatan.</p>	14/09/2021	<p>1. Surat kuasa sudah dilengkapi</p> <p>2. Kartu control perangkat elektronik sudah di isi oleh sub. Bagian umum dan keuangan.</p>	
12.	PN SAWAHLUNTO	16/06/2021 S/D 17/06/2021	<p>1. Kolom agenda sidang dalam SIPP tidak lengkap diisi seperti sidang pertama tidak diisi acara persidangannya tapi hanya diisi sidang pertama saja</p> <p>2. BPKB dan sertifikat yang</p>	02/06/2021	<p>1. Sudah di isi pada kolom agenda sidang SIPP</p>	

			disimpan dalam brankas belum dibuatkan BASTnya;		2. BASTnya sudah dibuatkan	
13.	PN TANJUNG PATI	28/06/2021 S/D 29/06/2021	1. Arsip Perkara yang telah diminutasi belum dilakukan Monev 2. Masih ditemukan kuitansi belanja ATK yang belum ditandatangani oleh PPK	17/05/2021	1. Sudah dilakukan monev dan dibuat jadwal monev 2. Sudah ditanda tanggani oleh PPK	
14.	PN LUBUK SIKAPING	31/03/2021 S/D 01/04/2021	1. Bahwa Terdapat tanggal BHT yang belum diinput ke Aplikasi SIPP pada Perkara perdata 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Rumah Dinas di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum ada.		1. Telah di tindaklanjuti langsung saat pengawasan 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Rumah Dinas di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sudah di tindaklanjuti dengan membuat permohonan bantuan kepada Bupati dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman untuk membantu pengurusan IMB Kantor dan Rumah Dinas	

					Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.	
15.	PN PASAMAN BARAT	05/07/2021 S/D 06/07/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua buku register tahun 2020 yang harus dilakukan penutupan pada akhir tahun tidak dilakukan oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri. 2. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman barat belum membuat PKP. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera dan ketua Pengadilan Negeri telah menutup semua buku register pidana yang ditutup pada akhir tahun 2020. 2. Semua hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sudah membuat PKP 	
16.	PN PULAU PUNJUNG	29/07/2021 S/D 30/07/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada buku Register Informasi di Loket PTSP 2. Buku catatan perilaku penilaian pegawai belum dibuat oleh atasan langsung 	19/07/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibuatkan SK KPN tentang petugas yang ditunjuk dan petugas yang ditunjuk melaksanakan apa yang jadi tupoksinya. 2. Atasan langsung sudah membuat buku catatan, penilaian kinerja PNS dan melakukan penilaian berdasarkan norma standard dan prosedur peraturan pemerintah no. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja pegawai. 	

**REKAP HASIL PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI SE SUMBAR
PADA TAHUN 2021 SEMESTER II (DUA)**

REKAP HASIL PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI SESUMBAR						
NO	NAMA SATKER	TANGGAL LHP	LHP	TANGGAL TLHP	TLHP	KET.
1.	PN PADANG	07/12/2021	1. Hakim pengawas bidang belum melaksanakan Pengawasan setiap minggu hanya sekali dalam sebulan dan arsip laporan hasil pengawasan bidang belum ada dokumentasi pada kepaniteraan hukum 2. Rumah dinas masih dipakai oleh pihak lain yang bukan warga Pengadilan Negeri Padang	10/12/2021	1. Hakim pengawas melakukan pengawasan setiap minggu dan telah membuat laporan hasil pengawasan bidang setiap bulannya dan telah melaporkan ke KPN dan arsip sudah diserahkan ke Panmud Hukum 2. Pihak lain Rumah dinas tersebut sudah disurati dan belum ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan.	
2.	<u>PN PARIAMAN</u>	29/11/2021	1. Masih ada Panitera Pengganti yang	09/12/2021	1. Panitera Pangganti sudah mengupload court celender	

		S/D 30/11/2021	belum/tidak mengupload court celender persidangan 2. Belum semua Barang Milik Negara BMN Pengadilan Negeri Pariaman yang diberi labelisasi	1	persidangan dan panitera sudah memonitor Bapak/ibu dalam penguploatan court calendar. 2. Petugas sudah melakukan pemasangan labelisasi setiap BMN yang ada di Pengadilan Negeri Pariaman	
3.	<u>PN PAINAN</u>	15/11/2021 S/D 16/11/2021	1. Pemberitahuan inzage agar dibuat seperti relas dengan dibubuhi tanda tangan pihak yang bersangkutan. 2. Kwitansi belanja persediaan belum di Upload di E BIMA	24/11/202 1	1. Sudah dibuat izage seperti relas dan ditanda tangani oleh para pihak 2. Bendahara sudah mengupload kuitasi belanja pesedian ke E BIMA	
4.	<u>PN SOLOK</u>	11/11/2021 S/D 12/11/2021	1. Penutupan buku register induk perkara tidak sesuai dengan ketentuan, penutupan harus ditanda tangani oleh panmud dan petugas register 2. Belum semua Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri	22/11/202 1	1. Petugas register dan Panmud sudah menandatangani penutupan buku register induk perkara. 2. Petugas sudah melakukan Labelisasi setiap BMN yang	

			solok yang diberi labelisasi.		ada di Pengadilan Negeri Solok	
5.	PN KOTO BARU	13/12/2021 S/D 14/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya berkas perkara yang inactive sebanyak 30 (tiga puluh) berkas yang belum diserahkan kepada Panmud Hukum 2. Tidak seragamnya format surat izin keluar kantor 	26/11/2021 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Perkara Yang Inactive 30 (Tida Puluh) Berkas Sudah Diserahkan Kepada Panmud Hukum 2. Telah dilakukan perbaikan mencantumkan berapa lama (dari jam.... s.d jam.....) izin keluar kantor dilakukan oleh hakim dan ASN Pengadialn Negeri Koto Baru 	
6.	PN PADANG PANJANG	15/11/2021 S/D 16/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian Tugas masing-masing unit/personel sudah ada namun belum dilakukan monev 2. Belum dilakukan evaluasi terhadap implementasi SOP bagian Kepegawaian dan ortala 	29/11/2021 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dilaksanakan monev uraian masing-masing personel setiap bulan 2. Akan melakukan monev implementasi SOP sub bagian Kepegawaian dan ortala setiap bulan 	
7.	PN BATUSANGKAR	07/11/2021 S/D 08/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada buku register tentang pengaduan dan arsip pengaduan meskipun hanya berupa tembusan ke Pengadilan Negeri Batusangkar 	15/11/2021 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dibuatkan buku register pengaduan 	

			2. Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Batusangkar belum pernah melakukan pengukuran kinerja terhadap SKP pegawai		2. Memonitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai setiap bulannya;	
8.	PN BUKITTINGGI	25/11/2021 S/D 26/11/2021	1. Pimpinan belum melakukan monev setiap bulan terhadap pelaporan keuangan perkara dan Komdanas 2. SOP BMN belum dimonitoring dan dievaluasi	06/12/2021 1	1. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi melakukan Monev pada setiap bulannya 2. Bagian umum sudah melakukan evaluasi terhadap SOP BMN tersebut.	
9.	PN LUBUK BASUNG	25/11/2021 S/D 26/11/2021	1. Buku Register Uang Jaminan/Titipan tidak ada dibuat 2. Bendahara penerima belum mempunyai sertifikat bendahara .	06/12/2021 1	1. Sudah dibuat Buku Register uang jaminan/titipan tersendiri 2. Bendahara sudah diusulkan mengikuti sertifikat bendahara penerima	
10.	PN PAYAKUMBUH	08/12/2021 S/D 09/12/2021	1. Putusan perdata sebagian belum diparaf oleh Majelis Hakim setiap Halaman 2. Uraian tugas masing-masing pegawai pada	20/12/2021 1	1. Majelis sudah memaraf putusan pada setiap halaman 2. Uraian Tugas sudah dibuat dan sudah diletakkan di atas meja	

			meja dibagian kepegawaian, Organisasi dan tata laksana tidak ada.		masing-masing	
11.	PN MUARO	09/12/2021 S/D 10/12/2021	1. Buku Register Hakim Pengawas bidang kolom-kolomnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Laporan kendali perawatan barang inventaris belum dibuat	20/12/2021 1	1. Sudah dibuat buku register Hakim pengawas dengan kolom yang terdiri atas kondisi, kriteria, akibat dan rekomendasi 2. Sudah dibuatnya Laporan kendali perawatan barang inventaris	
12.	PN SAWAHLUNTO	23/11/2021 S/D 24/11/2021	1. Meja Kasir bersatu dengan pojok e-court 2. Penyerapan anggaran DIPA 03 per Oktober 2021 sebesar 73 %	03/12/2021 1	1. Suda dipisahkan meja kasih dan pojok e-court 2. Penyerapan anggaran DIPA sudah direalisasikan anggaran terserap maksimal	
13.	PN TANUNG PATI	28/11/2021 S/D 29/11/2021	1. Uraian tugas masing-masing sudah ada, namun karena ada salah satu staf pidandah ke Pengadilan Negeri Lian maka tugas yang bersangkutan k etas lain dan uraian tugasnya belum diperbarui. 2. Rencana kebutuhan pegawai belum dibuat	12/12/2021 1	1. Telah ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan dengan membuat uraian tugas yang baru 2. Telah dilakukan rapat rencana kebutuhan pegawai dan dibuat rencana kebutuhan pegawai	

14.	PN LUBUK SIKAPING	06/12/2021 S/D 07/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register 1 dan halaman terakhir tidak ditandatangani 2. SOP bagian keuangan sudah dibuat akan tetapi belum dimonev 	16/12/2021 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register 1 dan halaman terakhir sudah ditanda tangani. 2. Bagian Keuangan sudah memonev SOP
15.	PN PASAMAN BARAT	08/12/2021 S/D 09/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tugas masing-masing di kepaniteraan perdata belum lengkap. 2. Bagian kepegawaian Pengadilan Negeri Pasaman Barat belum pernah melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap SKP para Pegawai. 	20/12/2021 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan penambahan uraian tugas bagi petugas yang rangkap jabatan. 2. Kepegawaian telah melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap SKP para pegawai.
16.	PN PULAU PUNJUNG	13/12/2021 S/D 15/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan didalam sampul berkas perkara tidak di isi tanggal penundaan sidang meskipun di ceklisnya ada 2. SK petugas arsip belum diperbarui 	24/12/2021 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi sampul berkas perkara tanggal penundaan sidang tersebut 2. SK petugas arsip sudah diperbarui.

B. EVALUASI

Pengawasan lainnya dalam bentuk mengevaluasi kinerja melalui dokumen yang telah dilakukan kepada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, dimana dokumen yang dievaluasi adalah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dokumen SAKIP terdiri dari IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan direviu setiap tahunnya, kemudian di rencanakan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) dalam periodic 5 Tahun yang direviu pula, diturunkan setiap RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan ditetapkan kembali menjadi PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan), serta terakhir dilaporkan hasilnya dalam bentuk LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021, dengan metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Laporan hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir) dengan pemeringkatan dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL EVALUASI SAKIP SATKER

MATRIK EVALUASI NILAI SAKIP TAHUN 2020
(PELAKSANAAN EVALUASI TAHUN 2021)
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MAHKAMAH AGUNG

Nama Satker: Pengadilan Tinggi Padang

NO	Nama Satuan Kerja	Skor	Kategori	Interpretasi
1	PN Bukittinggi	77,06	BB	Sangat Baik
2	PN Pasaman Barat	70,07	BB	Sangat Baik
3	PN Muaro	69,73	B	Baik
4	PN Padang	69,32	B	Baik
5	PN Padang Panjang	69,06	B	Baik
6	PN Koto Baru	68,77	B	Baik
7	PN Pariaman	68,58	B	Baik
8	PN Lubuk Sikaping	68,35	B	Baik
9	PN Tanjung Pati	67,99	B	Baik
10	PN Lubuk Basung	67,69	B	Baik
11	PN Sawahlunto	67,38	B	Baik
12	PN Painan	67,18	B	Baik
13	PN Payakumbuh	67,17	B	Baik
14	PN Batusangkar	64,77	B	Baik
15	PN Solok	60,27	B	Baik
16	PN Pulau Punjung	60,08	B	Baik

Padang, 19 Juli 2021
PENGADILAN TINGGI PADANG
SEKRETARIS

HJ. YEFNI DELFITRI, S.H., M.H.
NIP. 19640703 199103 2 005

Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk perlu diadakan evaluasi terhadap Laporan Tahunan untuk keselarasan data dengan Dokumen SAKIP;

Dalam hal evaluasi bahwa Pengadilan Tinggi Padang melakukan evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat setiap tahunnya, agar dapat dijadikan pedoman penilaian dalam hal pencapaian kinerja. Untuk mengevaluasi dokumen SAKIP tersebut, Pengadilan Tinggi Padang membentuk Tim Evaluator dan pelaksanaan evaluasinya pada tanggal 19 Juli 2021. Demikian laporan hasil

evaluasi dokumen SAKIP tersebut dimuat dalam Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi yang dikirimkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Padang berjalan baik dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2021 dapat diselesaikan. Hal ini tertuang pada SIPP dalam penanganan perkara.
2. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Padang tahun 2021 dengan objek pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan Mahkamah Agung RI, telah memberikan hasil yang lebih positif hal ini terbukti dengan peningkatan sumber daya dan efektifitas pelaksanaan tugas.
3. Pengelolaan keuangan DIPA Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang ada.
4. Pengelolaan administrasi peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.

B. SARAN

1. Untuk percepatan proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan juga didukung oleh dana yang tersedia dalam DIPA.
2. Untuk peningkatan terlaksananya administrasi kesekretariatan yang maksimal diperlukan personil yang cukup berimbang dengan beban kerja.
3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang terutama dalam hal keterbukaan informasi.
4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Padang.